

# **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP BIAYA AUDIT**



## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ZAKIAH ZULFA**

**NIM. 12030116120038**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2023**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Zakiah Zulfa

Nomor Induk Mahasiswa : 12030116120038

Fakultas/Program Studi : Ekonomika dan Bisnis/S1 Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH TATA KELOLA**

**PERUSAHAAN TERHADAP**

**BIAYA AUDIT**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Indira Januarti, M.Si., Akt., CA., CFra.

Semarang, 20 Juni 2023

Dosen Pembimbing

**FEB UNDIP**

Prof. Dr. Indira Januarti, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 19640101 199202 2001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Zakiah Zulfa  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030116120038  
Fakultas/Program Studi : Ekonomika dan Bisnis/S1 Akuntansi  
Judul Skripsi : PENGARUH TATA KELOLA

PERUSAHAAN TERHADAP  
BIAYA AUDIT

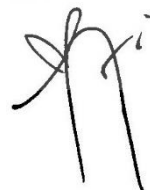
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Juni 2023  
dan telah dinyatakan LULUS

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Indira Januarti, S.E., M.Si., Akt.  
Anggota : 1. Dr. Siti Mutmainah, S.E., Akt., M.Si.  
2. Wahyu Meiranto, S.E., Akt., M.Si.

Semarang, 27 Juni 2023

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Ketua Tim Penguji



Agung Juliarto, SE., M.Si., Akt., Ph.D. Prof. Dr. Indira Januarti, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 19730722 200212 1002

NIP. 19640101 199202 2001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Zakiah Zulfa, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP BIAYA AUDIT adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dan meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Apabila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seakan-akan hasil dari pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Semarang, 20 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



( Zakiah Zulfa )

NIM. 12030116120038

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

(QS. Ad-Dhuha: 3)



**FEB UNDIP**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah, Ibu, Abang, dan Uda

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of corporate governance on audit fees in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2014-2022 period. The variables tested in this study are corporate governance (independence of the board of commissioners, independence of the audit committee, audit committee meeting intensity, board of commissioners meeting intensity, and board size), and audit quality (Big4). Data collection was carried out using a purposive sampling method for all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2014-2022. A total of 330 total observations were sampled in this study. The data analysis technique is multiple linear regression.*

*The results of this study show that the independence of the board of Commissioners, the independence of the audit committee, the intensity of audit committee meetings, and the size of the Board of Commissioners have a significant relationship to audit fees. Corporate governance has a significant relationship to audit quality. However, the intensity of the Board of Commissioners' meetings does not have a significant effect on audit fees.*

*Keywords: Board of Commissioners independence, Audit committee independence, Audit committee meeting intensity, Board of Commissioners meeting intensity, Board of Commissioners size, Big4, audit fee.*



## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap biaya audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2022. Variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah tata kelola perusahaan (Dewan komisaris independen, komite audit independen, intensitas rapat komite audit, intensitas rapat dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris), kualitas audit (Big4). Pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling untuk semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014-2022. Sebanyak 330 total observasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis data adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, komite audit independen, intensitas rapat komite audit, dan ukuran dewan komisaris memiliki hubungan yang signifikan terhadap biaya audit. Tata kelola perusahaan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kualitas audit. Namun, intensitas rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya audit.

Kata kunci: Dewan komisaris independen, Komite audit independen, Intensitas rapat komite audit, Intensitas rapat dewan komisaris, Ukuran dewan komisaris, Big4, biaya audit.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhānahu Wata'ālā yang telah melimpahkan hidayah, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP BIAYA AUDIT”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari selama proses penyusunan skripsi tidak lepas dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah Subhānahu Wata'ālā yang senantiasa melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai atas izin-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Fuad, S.E.T., M.Si., Ph.D., CFE. Selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Bapak Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.



5. Ibu Prof. Dr. Indira Januarti, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing skripsi yang memberikan arahan dan ilmu dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., Akt., M.Si. selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
7. Para dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan aktivitasnya untuk menguji sidang skripsi penulis.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang memberikan ilmu dan pelajaran selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu untuk melancarkan proses perkuliahan sampai tahap penyelesaian skripsi penulis.
10. Kedua orang tua, yaitu Bapak Sudirman dan Ibu Yarnis beserta Abang Andry, Uda Tony yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis.
11. Teman penulis, Nadia, Rakintan, Rika, Fadhly, Asma dan Ailsa yang telah membantu jalannya proses perkuliahan penulis.
12. Teman-teman Akuntansi Undip 2016 yang telah kebersamai dalam proses perkuliahan bersama penulis.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hal ini tidak mampu menggambarkan rasa terima kasih atas berbagai dukungan dan semangat yang diberikan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan dan saran dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Semarang, 20 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zakiah Zulfa', written over a light blue grid background.

( Zakiah Zulfa )

NIM. 12030116120038

**FEB UNDIP**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	15
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	16
1.4 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	19
2.1 Landasan Teori .....	19
2.1.1 Teori Keagenan .....	19
2.1.2 Definisi Tata Kelola Perusahaan.....	21
2.1.3 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan.....	23
2.1.4 Manfaat Tata Kelola Perusahaan .....	27
2.1.5 Struktur Tata Kelola Perusahaan.....	27
2.1.6 Audit Internal .....	35
2.1.7 Audit Eksternal.....	38

2.1.8	Biaya Audit .....	39
2.2	Penelitian Terdahulu.....	42
2.3	Kerangka Pemikiran .....	52
2.4	Hipotesis.....	53
2.4.1	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Biaya Audit.....	53
2.4.2	Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Biaya Audit.....	54
2.4.3	Pengaruh Intensitas Rapat Komite Audit terhadap Biaya Audit.....	56
2.4.4	Pengaruh Intensitas Rapat Dewan Komisaris terhadap Biaya Audit.. .....	57
2.4.5	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Biaya Audit.....	58
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	60
3.1.1	Variabel Dependen.....	60
3.1.2	Variabel Independen .....	60
3.1.3	Variabel Kontrol.....	62
3.2	Populasi dan Sampel .....	63
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	64
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	65
3.5	Metode Analisis.....	65
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	65
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	65
3.5.3	Pengujian Hipotesis.....	68
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	72
4.2	Analisis Data .....	73
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	73
4.2.2	Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	76
4.2.3	Uji Hipotesis .....	81
4.3	Interpretasi Hasil .....	84
4.3.1	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Biaya Audit.....	84
4.3.2	Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Biaya Audit.....	85

4.3.3	Pengaruh Intensitas Rapat Komite terhadap Biaya Audit.....	85
4.3.4	Pengaruh Intensitas Rapat Dewan Komisaris terhadap Biaya Audit.. .....	86
4.3.5	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Biaya Audit.....	86
BAB V PENUTUP .....		88
5.1	Kesimpulan.....	88
5.2	Keterbatasan .....	89
5.3	Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....		91
LAMPIRAN .....		96



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	46
Tabel 4.1 Hasil Seleksi Sampel berdasarkan Metode <i>Purposive Sampling</i> .....	73
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Tahun 2014-2022 .....	74
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas .....	77
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	78
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Glejser</i> .....	79
Tabel 4.6 Hasil Uji Run Test.....	80
Tabel 4.7 Hasil Uji Durbin Watson.....	80
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	81
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	82
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	83





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 52



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Hasil <i>Output</i> SPSS.....	96
--	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 yang diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, definisi audit adalah jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik berserta Tim Perikatan dari Kantor Akuntan Publik berdasarkan Surat Perikatan yang bertujuan memberikan opini auditor independen yang menyatakan bahwa laporan keuangan diterbitkan dari entitas tersebut disusun serta disajikan sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan kualitas laporan keuangan tersebut. Profesi akuntan publik menjadi peranan penting bagi pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi bahwa laporan keuangan disajikan secara andal sehingga sangat wajar memberikan imbalan dari jasa profesional (*audit fee*) kepada akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan. Dalam aturan tersebut tarif imbalan jasa menggambarkan remunerasi bagi anggotanya dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing.

Dalam Standar Audit 220 (Revisi 2021) tentang Pengendalian Mutu Untuk Audit Atas Laporan Keuangan mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan SA. Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai

dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Bentuk profesionalisme auditor dapat dilihat dengan menjalankan tugas sesuai Standar Profesional Akuntan Publik, selain itu juga dapat diketahui dari penetapan biaya audit atas jasa audit yang dilakukan Wiryaningrum (2018). Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramesti & Wiratmaja (2017) mengatakan bahwa semakin tinggi biaya audit maka semakin baik kualitas auditnya.

Berdasarkan perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dimana besaran biaya audit yang dikeluarkan perusahaan masih bersifat *voluntary disclosure* atau pengungkapan secara sukarela. Oleh sebab itu, besaran biaya audit belum seluruhnya dicantumkan pada laporan tahunan perusahaan (Fadhil Izzani & Khafid 2022; Kusumajaya 2017; Sibuea & Arfianti 2021). Walaupun perusahaan tidak mencantumkan besaran biaya audit menurut Sinaga & Rachmawati (2018) dapat dilihat pada *professional fee* yang terdapat pada laporan keuangan sebagai alternatif pengukuran biaya audit yang rasional, karena ketersediaan besaran biaya audit belum ada. Menurut Fahrie & Hakim (2020) *Professional fee* yang terdapat pada laporan keuangan diberikan kepada tenaga ahli suatu profesi untuk jasanya sehingga mendapatkan imbal jasa atas hal tersebut. Perusahaan juga menggabungkan biaya atas semua jasa yang dibayarkan perusahaan kepada lembaga profesi penunjang perusahaan hal tidak sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik bahwa bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan memberikan informasi terkait penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) yang salah

satunya adalah informasi terkait biaya jasa audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku. Sehingga, besaran biaya audit yang dikeluarkan perusahaan lebih akurat untuk diukur.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik juga memberi ketentuan terkait isi laporan tahunan perusahaan yang memuat tata kelola emiten atau perusahaan publik dimana dewan komisaris dan komite audit termasuk salah satu organ perusahaan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan didukung peran akuntan publik atau kantor akuntan publik (KAP) sebagai lembaga atau profesi independen yang berperan untuk keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut Jensen & Meckling (1976) konflik agensi terjadi karena adanya pemisahan antara prinsipal dan agen. Sehingga, teori keagenan ini erat kaitannya dengan permasalahan audit. Permintaan jasa audit disebabkan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan yaitu agen dan prinsipal. Oleh karena itu auditor menjadi peranan penting dalam mengatasi permasalahan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak (Wiryaningrum, 2018).

Terdapat mekanisme tata kelola perusahaan yang sering digunakan dalam berbagai penelitian yang bertujuan mengurangi konflik keagenan, yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial Nugrahani & Sabeni (2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani & Sabeni (2013) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit,

karakteristik auditor, ukuran perusahaan, dan anak perusahaan berpengaruh signifikan terhadap biaya audit. Sedangkan, untuk internal audit, dewan komisaris independen, jumlah pertemuan dewan komisaris, komite audit independen dan jumlah pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap biaya audit.

Perusahaan yang terjun dalam dunia usaha harus mempersiapkan banyak hal sebelum memulainya karena seiring dengan berkembangnya perusahaan maka akan semakin banyak muncul pesaing dalam dunia usaha. Salah satu persiapan yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah menyediakan kebutuhan informasi keuangan perusahaan yang tersaji dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2015) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009) tentang laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selain itu, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan digunakan untuk mengambil keputusan bagi pihak yang berkepentingan seperti pihak karyawan, investor, kreditur, pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan harus menampilkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Sebuah perusahaan tentu mempunyai tujuan untuk memperoleh profitabilitas yang tinggi serta berkelanjutan. Namun, dalam memperoleh profitabilitas yang diinginkan perusahaan harus melakukan praktik pengelolaan secara efektif dan efisien. Praktik inilah yang menjelaskan terdapat hubungan keagenan yaitu kontrak antara pihak pemberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen) Jensen & Meckling (1976). Prinsipal pada perusahaan adalah pemilik perusahaan atau investor dan agen pada perusahaan adalah



manajemen perusahaan. Pemilik perusahaan atau investor memberi wewenang kepada manajemen perusahaan untuk mengelola perusahaan sehingga investor memperoleh profitabilitas dari pengelolaan perusahaan tersebut. Namun, hubungan keagenan ini dapat menimbulkan masalah dalam praktiknya yaitu antara prinsipal dan agen yang dilatar belakangi oleh kepentingan masing-masing. Prinsipal menginginkan *return* yang besar dari saham yang diinvestasikannya kepada perusahaan, sedangkan agen menginginkan kompensasi atas kerja keras mereka terhadap pengelolaan perusahaan. Agen yang mengelola perusahaan memiliki informasi perusahaan yang sebenarnya dan cenderung bisa memanipulasi kebenaran laporan keuangan perusahaan dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada prinsipal, inilah yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Mekanisme pengawasan dan pengendalian yang diterapkan dalam tata kelola perusahaan dilandasi oleh teori keagenan karena diharapkan dengan adanya tata kelola perusahaan dapat memberikan kepercayaan kepada agen yang diberikan wewenang oleh prinsipal dalam mengelola perusahaan tersebut dan prinsipal menjadi lebih yakin bahwa agen tidak melakukan kecurangan untuk kepentingannya sendiri.

Contoh skandal akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan adalah masalah yang dilakukan oleh perusahaan Enron di Amerika Serikat pada tahun 2000 dan berakhir bangkrut karena CEO, komisaris, komite audit, auditor internal bahkan auditor eksternal terlibat dalam skandal ini. Salah satu KAP Big 5 pada saat itu yaitu Arthur Andersen yang menjadi auditor eksternal perusahaan Enron yang melakukan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan selama hampir 20 tahun.

Biaya audit yang dibayarkan perusahaan Enron kepada KAP Arthur Andersen lebih dari \$50 juta, yaitu berupa biaya atas jasa konsultasi \$27 juta dan biaya atas jasa audit \$25 juta (Prawira, 2017).

Akibat skandal akuntansi perusahaan Enron maka terciptalah *The Sarbanes Oxley Act* (SOX) di tahun 2000 yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan investor setelah terjadinya skandal akuntansi ini dan kebangkrutan perusahaan besar di Amerika Serikat. SOX banyak digunakan negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP, dengan cara melakukan rotasi KAP dan auditornya Priambardi & Haryanto (2014). Selain itu, di Indonesia juga pernah terjadi skandal laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018. Perusahaan mengklaim mendapatkan laba bersih senilai \$809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (dengan asumsi kurs Rp14.000 per dollar AS). Sedangkan di tahun 2017 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menderita kerugian senilai \$216,5 juta, angka ini sangat terlihat mengalami kenaikan drastis yang menyebabkan 2 anggota dewan komisaris menolak untuk menandatangani laporan keuangan karena mereka menduga terdapat kejanggalan dalam pencatatan transaksi. Kasus ini terdeteksi sehingga terjadi pengenaan sanksi oleh berbagai pihak karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi untuk pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Sanksi diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada akuntan publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member dari BDO International), Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan sanksi kepada auditor dengan membekukan izin kerjanya selama 12 bulan. Selain itu, OJK

memberikan sanksi kepada jajaran Direksi dan Komisaris dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan masing-masing direksi harus membayar denda Rp100 juta. Lalu, BEI juga memberikan sanksi sebesar Rp250 juta kepada pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Siddiq & Suseno (2019). Terjadinya masalah akuntansi tersebut menjadi turunnya kepercayaan masyarakat, berarti masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pengendalian dari tata kelola perusahaan yang berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan. Pada tahun 2000 Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerapkan adanya kebijakan rotasi bagi akuntan publik beserta Kantor Akuntan Publik (KAP). Peraturan rotasi ini berdampak baik untuk menjaga independensi auditor maupun KAP itu sendiri. Kewajiban ini diatur pemerintah dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan rotasi KAP paling lama 5 tahun berturut-turut dan seorang akuntan publik paling lama 3 tahun berturut-turut. Peraturan ini direvisi kembali menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang rotasi seorang akuntan publik paling lama 3 tahun berturut-turut dan rotasi KAP menjadi 6 tahun berturut-turut.

Pada tahun 1999 konsep tata kelola perusahaan yang baik telah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia pada tahun 2000 dan direvisi kembali pada tahun 2006. Isi dari pedoman tersebut

agar perusahaan melaksanakan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dan dituangkan dalam laporan tahunan perusahaan, hal ini diperlukan agar mendorong terjadinya pasar yang efisien, transparan dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut membuat peraturan yang mewajibkan perusahaan harus membentuk komite audit dengan dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Lalu pembentukan audit internal dengan dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 dan melakukan penerapan tata kelola perusahaan dengan membentuk komisaris independen sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017, serta perusahaan harus mengungkapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan. Perusahaan yang *go public* wajib mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik dengan ketentuan bahwa laporan keuangan tersebut sudah diaudit oleh pihak independen yaitu akuntan publik. Hal ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) terdapat organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, dan direksi. Ketiganya mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif karena masing-masing komponen organ perusahaan mempunyai independensi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan. RUPS sebagai organ perusahaan menjadi wadah untuk para pemegang saham dalam mengambil

keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Kepengurusan perusahaan di Indonesia menganut *two board system* yaitu dewan komisaris dan direksi masing-masing mempunyai tanggung jawab dan wewenang. Namun keduanya secara jangka panjang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan perusahaan. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta arahan kepada direksi untuk memastikan perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik tetapi tidak dibolehkan untuk andil mengambil keputusan operasional. Jumlah dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan agar berjalan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen yaitu anggota yang tidak berasal dari pihak terafiliasi dan komisaris terafiliasi yaitu pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan orang-orang yang berada di dalam perusahaan. Dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komite, seperti komite audit yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi, menjadi struktur pengendalian internal perusahaan serta pelaksanaan audit internal maupun eksternal sesuai dengan standar audit, lalu melakukan tindak lanjut temuan hasil audit yang dilaksanakan pihak manajemen. Direksi sebagai organ perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan serta dapat mengambil keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Pertanggungjawaban dari direksi dalam pengelolaan perusahaan adalah dalam bentuk laporan tahunan yang



memuat laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Terdapat dua argumen yang menyatakan hubungan antara tata kelola perusahaan dengan biaya audit. Teori substitusi menjelaskan semakin sempurna tata kelola internal perusahaan maka semakin rendah biaya agensi yang mengakibatkan kecilnya risiko perusahaan yang akan dihadapi auditor sehingga biaya audit yang dibayarkan menjadi rendah. Sedangkan hasil penelitian lainnya menyatakan perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik akan memilih auditor eksternal yang lebih bagus yang mengakibatkan biaya audit menjadi lebih tinggi Mardani (2018). Kantor Akuntan Publik terdiri dari KAP *big four* dan KAP *non-big four*. Di Indonesia pasar audit masih bersifat *cost focus* dibanding *quality focus/brand focus* berarti untuk memilih KAP dilihat melalui biaya auditnya daripada kualitas atau nama besar KAP Hazmi & Sudarno (2013). Terdapat beberapa faktor penentu biaya audit yaitu tata kelola perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan intensitas pertemuan dewan komite audit. Faktor penentu lainnya yaitu kualitas audit dan struktur kepemilikan (Mame, 2020).

Beberapa penelitian yang membahas topik mengenai biaya audit, antara lain penelitian dari (Al-Najjar 2018; Anandita & Wiliasti 2020; Chandra 2015; Hazmi & Sudarno 2013; Mame 2020; Pratama & Cahyonowati 2015; Rizqiasih 2010; Sitompul 2017; Widiyasari & Prabowo 2008). Hasil penelitian Al-Najjar (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit dikarenakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen dalam keanggotaan dewan komisaris maka semakin baik peran tata



kelola perusahaan sehingga lebih meningkatkan kontrol dan pemantauan secara ketat terhadap kondisi keuangan perusahaan, akan menyebabkan adanya tuntutan untuk audit lebih lanjut dari auditor eksternal tentunya biaya audit menjadi meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Cahyonowati (2015) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap biaya audit, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Beasley (1996) dengan mengatakan bahwa pihak yang tidak terafiliasi semakin banyak maka akan tercipta pengawasan yang lebih unggul, sehingga terdapat validitas dan reliabilitas pelaporan keuangan akan dicapai dan menyebabkan biaya audit menjadi turun karena banyaknya komisaris independen dalam anggota dewan komisaris bisa menaksir risiko terlebih dahulu.

Komite audit independen menurut Al-Najjar (2018) mempunyai pengaruh negatif dengan biaya audit, sedangkan hasil penelitian Rizqiasih (2010) komite audit independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap biaya audit. Menurut Al-Najjar (2018) dalam penelitiannya, intensitas rapat komite audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Goodwin dan Kent (2006) dan Lifschutz (2010), sedangkan hasil penelitian menurut Pratama & Cahyonowati (2015) intensitas rapat komite audit tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap biaya audit, begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Abbott et al (2003) menyatakan bahwa intensitas rapat komite audit tidak signifikan dengan biaya audit.

Hasil penelitian menurut Al-Najjar (2018) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara intensitas rapat dewan komisaris terhadap biaya audit, hasil ini juga sejalan dengan penelitian Yatim et al (2006). Namun menurut Carcello et al (2002) dengan menyatakan bahwa dewan komisaris yang sering mengadakan rapat akan merasa ada tanggung jawab hukum dan juga berusaha melindungi reputasi dengan cara meminta layanan audit yang berkualitas sehingga akan meningkatkan biaya audit.

Jumlah atau ukuran dewan komisaris menurut penelitian Al-Najjar (2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif terhadap biaya audit, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vafeas & Waagelein (2007) karena semakin besar ukuran dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar tuntutan untuk sistem pelaporan audit yang komprehensif dan butuh jaminan audit yang lebih baik dari auditor eksternal. Namun hasil penelitian dari Wibowo (2012) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh terhadap biaya audit karena dalam pemilihan dewan komisaris bisa berdasarkan kedudukan dan kekerabatan sehingga menyebabkan hilangnya independensi dari dewan komisaris tersebut.

Kualitas audit terkait dengan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah faktor-faktor dari tata kelola perusahaan akan mempengaruhi dalam KAP dikarenakan perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik akan menuntut kualitas audit yang lebih baik juga Al-Najjar (2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Chandra 2015; Mame 2020; Sitompul 2017). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Suharli (2008) ukuran KAP tidak memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap biaya audit, diakibatkan perusahaan banyak menggunakan jasa KAP *big 4* dari pada *non big 4*.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang, penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP BIAYA AUDIT”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Profesi akuntan publik menjadi peranan penting bagi pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi bahwa laporan keuangan disajikan secara andal sehingga sangat wajar memberikan imbalan dari jasa profesional (*audit fee*) kepada akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan. Bentuk profesionalisme auditor dapat dilihat dengan menjalankan tugas sesuai Standar Profesional Akuntan Publik, selain itu juga dapat diketahui dari penetapan biaya audit atas jasa audit yang dilakukan Wiryaningrum (2018). Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramesti & Wiratmaja (2017) mengatakan bahwa semakin tinggi biaya audit maka semakin baik kualitas auditnya.

Menurut Jensen & Meckling (1976) konflik agensi terjadi karena adanya pemisahan antara prinsipal dan agen. Sehingga, teori keagenan ini erat kaitannya dengan permasalahan audit. Permintaan jasa audit disebabkan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan yaitu agen dan prinsipal. Oleh karena itu auditor menjadi peranan penting dalam mengatasi permasalahan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak Wiryaningrum (2018). Terdapat mekanisme tata kelola perusahaan yang sering digunakan dalam berbagai penelitian yang bertujuan mengurangi konflik keagenan, yaitu komisaris independen, komite

audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial (Nugrahani & Sabeni, 2013).

Beberapa penelitian juga membahas topik mengenai biaya audit, antara lain penelitian dari (Al-Najjar 2018; Anandita & Wiliasti 2020; Chandra 2015; Hazmi & Sudarno 2013; Mame 2020; Pratama & Cahyonowati 2015; Rizqiasih 2010; Sitompul 2017; Widiyasari & Prabowo 2008). Akan tetapi penelitian-penelitian sebelumnya mengalami perbedaan hasil antara pengaruh tata kelola perusahaan terhadap biaya audit.

Berdasarkan perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dimana besaran biaya audit yang dikeluarkan perusahaan masih bersifat *voluntary disclosure* atau pengungkapan secara sukarela. Oleh sebab itu, besaran biaya audit belum seluruhnya dicantumkan pada laporan tahunan perusahaan (Fadhil Izzani & Khafid 2022; Kusumajaya 2017; Sibuea & Arfianti 2021). Walaupun perusahaan tidak mencantumkan besaran biaya audit menurut Sinaga & Rachmawati (2018) dapat dilihat pada *professional fee* yang terdapat pada laporan keuangan sebagai alternatif pengukuran biaya audit yang rasional, karena ketersediaan besaran biaya audit belum ada. Menurut Fahrie & Hakim (2020) *Professional fee* yang terdapat pada laporan keuangan diberikan kepada tenaga ahli suatu profesi untuk jasanya sehingga mendapatkan imbal jasa atas hal tersebut. Perusahaan juga menggabungkan biaya atas semua jasa yang dibayarkan perusahaan kepada lembaga profesi penunjang perusahaan hal tidak sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik bahwa bentuk dan

isi laporan tahunan emiten atau perusahaan memberikan informasi terkait penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) yang salah satunya adalah informasi terkait biaya jasa audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku. Sehingga, besaran biaya audit yang dikeluarkan perusahaan lebih akurat untuk diukur.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian serta perbedaan cara ukur biaya audit, *research gap* dalam penelitian sebelumnya. Maka, dalam penelitian ini ingin menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap biaya audit. Variabel kontrol berupa Big4 juga digunakan dalam penelitian ini.

Sehingga rumusan masalah penelitian diuraikan secara spesifik sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap biaya audit?
2. Apakah komite audit independen berpengaruh terhadap biaya audit?
3. Apakah intensitas rapat komite audit berpengaruh terhadap biaya audit?
4. Apakah intensitas rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap biaya audit?
5. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap biaya audit?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris:

1. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap biaya audit.



2. Pengaruh komite audit independen terhadap biaya audit.
3. Pengaruh intensitas rapat komite audit terhadap biaya audit.
4. Pengaruh intensitas rapat dewan komisaris terhadap biaya audit.
5. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap biaya audit.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

Berdasarkan aspek teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, penelitian ini dilakukan agar dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap biaya audit, serta penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan di bidang akuntansi dan pengauditan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu acuan dan referensi tambahan untuk digunakan dalam penelitian penetapan besaran biaya audit.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Berdasarkan aspek praktik, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai faktor tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi biaya audit yang dibayarkan perusahaan untuk mengawasi kinerja manajemen.



2. Bagi auditor, penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai faktor tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi biaya audit yang diterima auditor ketika melakukan audit laporan keuangan perusahaan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini terdapat lima sub bab yang terdiri dari:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdapat empat sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini terdapat empat sub bab yang menjelaskan mengenai teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan dapat berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini terdapat enam sub bab yang menjelaskan uraian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, penjelasan metode dalam menentukan populasi sampel, jenis dan sumber data serta penjelasan tentang metode

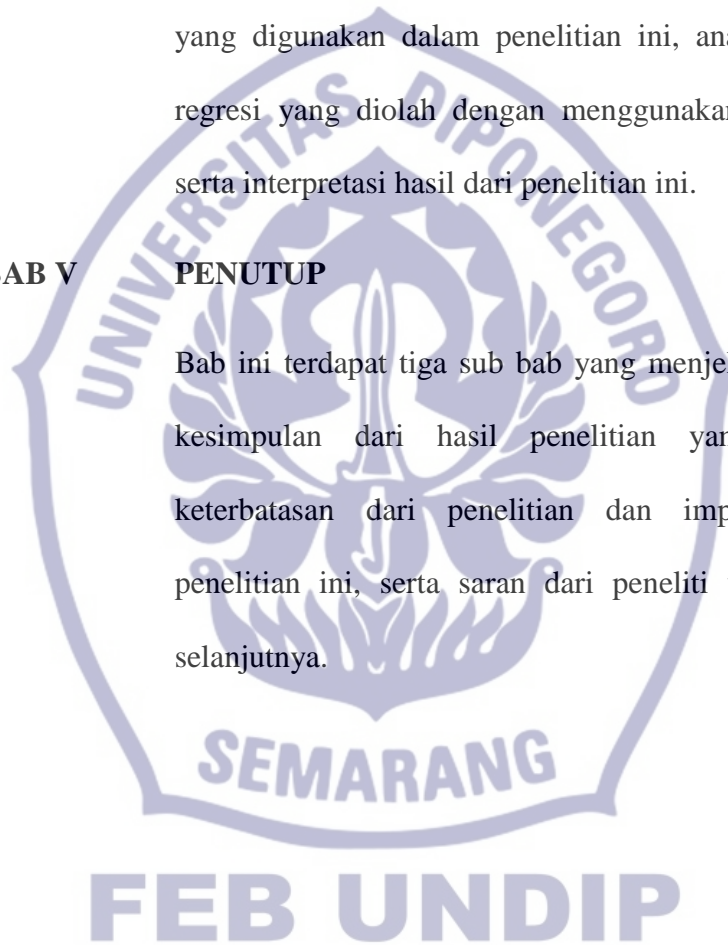
pengumpulan data dan analisis data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdapat tiga sub bab yang terdiri dari deskripsi objek yang digunakan dalam penelitian ini, analisis data, hasil regresi yang diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS serta interpretasi hasil dari penelitian ini.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdapat tiga sub bab yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuji, keterbatasan dari penelitian dan implikasi terhadap penelitian ini, serta saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh tata kelola perusahaan terhadap biaya audit sehingga untuk memahami bagaimana tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi biaya audit maka akan digunakan teori agensi sebagai landasan pemikiran dalam penelitian ini.

Pada tahun 1976 pertama kali dicetuskan teori agensi oleh Jensen dan Meckling. Teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976) adalah hubungan yang kontraktual antara satu pihak yaitu prinsipal yang melibatkan pihak lain yaitu pihak agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal, yang melibatkan beberapa otoritas pengambilan keputusan yang diserahkan kepada agen. Dalam hal ini dapat memunculkan adanya ketidaksamaan antara kepentingan prinsipal dan agen. Teori agensi menjelaskan terdapat hubungan keagenan antara prinsipal yang mendelegasikan pekerjaannya kepada pihak agen. Pada teori ini hakikatnya sulit tercipta hubungan antara prinsipal dan agen karena adanya kepentingan yang berbeda (*Conflict of Interest*), hal inilah yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi.

Terjadinya asimetri informasi ini menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk mengawasi dan mengontrol tindakan agen. Jensen & Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

- a) *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
- b) *Adverse Selection*, prinsipal tidak mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen didasarkan atas informasi yang diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik kepentingan dan asimetri informasi menyebabkan perusahaan menanggung biaya keagenan (*Agency Cost*). Konflik kepentingan dan asimetri informasi ini dapat dikurangi dengan melakukan mekanisme pengawasan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan kepercayaan terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan pemegang saham, dengan cara ini dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan. Selain itu, dengan peran pihak ketiga yaitu menggunakan jasa auditor eksternal dapat meminimalisir terjadinya masalah yang terjadi pada perusahaan karena dapat menjamin bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan merupakan gambaran keadaan yang sebenarnya sehingga pemegang saham merasa yakin dengan kinerja yang dilakukan manajemen. Perusahaan melalui peran komite

audit tentu melakukan pemilihan auditor eksternal lalu membayarkan biaya audit atas jasa yang dilakukan, dalam hal penentuan biaya audit nantinya terdapat dua perspektif yang dapat digunakan yaitu pendekatan *demand-supply*. Pendekatan dari perspektif *demand* menunjukkan bahwa biaya audit yang dibayarkan menjadi tinggi dikarenakan komite audit menginginkan perusahaan memiliki nilai tambah pada laporan keuangannya sehingga memilih kantor akuntan publik (KAP) yang bereputasi baik. Sedangkan, pendekatan dari perspektif *supply* menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik menjadikan risiko yang dihadapi oleh auditor eksternal menjadi berkurang sehingga biaya audit yang dibayarkan menjadi lebih rendah (Januarti et al., 2020).

### **2.1.2 Definisi Tata Kelola Perusahaan**

Pada tahun 1992 dalam laporannya istilah *corporate governance* atau tata kelola perusahaan diperkenalkan pertama kali oleh Komite Cadbury yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Isu *corporate governance* semakin berkembang ketika peristiwa ekonomi penting terjadi seperti skandal perusahaan Enron dan beberapa skandal ekonomi lainnya terjadi membuat dunia menyadari bahwa penting penerapan tata kelola perusahaan yang baik, karena efek negatif dari kurangnya penerapan tata kelola perusahaan mengakibatkan banyaknya perusahaan tidak mampu melanjutkan usahanya lagi.

Penerapan tata kelola perusahaan didasarkan pada teori agensi atau keagenan yaitu tata kelola perusahaan digunakan untuk memahami atau menentukan peran agen dalam memenuhi setengah dari hubungan kontraktual mereka yang mengatur hubungan keagenan. Tata kelola perusahaan yang



didefinisikan sesuai dengan teori keagenan bahwa dalam situasi tertentu, manajer mungkin tidak bertindak untuk memaksimalkan pengembalian pemegang saham yang bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka, kecuali diterapkannya struktur tata kelola perusahaan yang baik untuk melindungi kepentingan perusahaan (Marie L'Huillier, 2014).

Definisi tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) adalah suatu pilar dari sistem ekonomi pasar. Berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dari dunia usaha.

Definisi CG juga tertuang pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan bahwa CG sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Negara



BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, GCG didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

### 2.1.3 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, terdapat prinsip-prinsip dasar yang perlu dipatuhi. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang disusun oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pertama kali disusun pada tahun 1999 dan menjadi acuan berbagai negara dan perusahaan termasuk Indonesia. Selanjutnya dimutakhirkan pada tahun 2004 sebelumnya lalu terbitnya versi terbaru pada tahun 2015, dimana OECD menerbitkan *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Dalam *G20/OECD Principles of Corporate Governance* terdapat enam prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu:

#### **1. *Ensuring the basis for an effective corporate governance framework.***

Dalam prinsip ini kerangka tata kelola perusahaan harus mendorong terciptanya pasar yang transparan dan wajar, serta alokasi sumber daya yang efisien.

#### **2. *The rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions.***

Prinsip ini menyatakan kerangka tata kelola perusahaan melindungi dan memberikan fasilitas untuk melaksanakan hak-hak pemegang saham dan memastikan adanya perlakuan adil untuk semua para pemegang saham serta harus mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

***3. Institutional investors, stock markets and other intermediaries.***

Pada prinsip ini menyatakan bahwa kerangka tata kelola perusahaan memberikan insentif yang efektif di seluruh rantai investasi dan mendorong pasar modal berfungsi dengan cara yang berkontribusi terhadap tata kelola perusahaan yang baik.

***4. The role of stakeholders in corporate governance.***

Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama, dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan, dan keberlanjutan perusahaan.

***5. Disclosure and transparency.***

Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan untuk semua hal yang material terkait perusahaan, termasuk kondisi

keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Pada prinsip ini diharapkan dapat menurunkan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham.

#### **6. *The responsibility of the board.***

Pada prinsip ini kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan manajemen oleh dewan yang efektif, serta pertanggungjawaban dewan kepada perusahaan dan pemegang saham.

Di Indonesia pedoman mekanisme tata kelola perusahaan disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Setiap perusahaan memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) meliputi:

##### 1. *Transparansi (Transparency)*

Menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus inisiatif mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

## 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

## 4. Independensi (*Independency*)

Melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

## 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

#### 2.1.4 Manfaat Tata Kelola Perusahaan

Poin penting dari tata kelola perusahaan terkait dengan pengendalian perilaku manajemen dalam melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham). Selain itu, dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat membawa beberapa manfaat, menurut FCGI (2001) dalam Nasrum (2018) antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

#### 2.1.5 Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur dapat didefinisikan bagaimana suatu aktivitas dalam organisasi dapat diorganisir dan dikoordinasi. Struktur tata kelola perusahaan dapat diartikan sebagai kerangka dalam perusahaan untuk menerapkan berbagai prinsip tata kelola sehingga prinsip perusahaan dapat dijalankan dan dikendalikan. Struktur tata kelola perusahaan dapat terbagi menjadi beberapa model sebagai berikut:



#### a. Model Anglo-Saxon

Model Anglo-Saxon disebut sebagai *single board system* yaitu struktur tata kelola perusahaan tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan direksi. Dalam model Anglo-Saxon, struktur tata kelola perusahaan terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), *Board of Directors*, dan *Executive managers*. Dalam sistem ini anggota dewan komisaris merangkap anggota direksi dan kedua dewan ini disebut sebagai *board of directors*.

#### b. Model Continental Europe

Model ini disebut sebagai *two board system* yaitu struktur tata kelola perusahaan yang memisahkan keanggotaan dewan, antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan direksi sebagai eksekutif perusahaan (manajemen perusahaan). Dalam model Continental Europe, struktur tata kelola perusahaan terdiri dari RUPS, dewan komisaris, dewan direktur, dan manajer eksekutif (manajemen).

Perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya berbasis *two board system* atau *two tier board system*. Perbedaannya hanya terdapat pada kedudukan dewan komisaris yang tidak langsung membawahi direksi. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada pada Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 yang menyatakan bahwa direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 80 ayat 1 dan pasal 91 ayat 1), begitu juga dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 95 ayat 1 dan pasal 101 ayat 1). Kedua dewan ini bertanggung jawab terhadap RUPS (Nasrum, 2018).



Struktur tata kelola perusahaan adalah organ-organ perusahaan yang memiliki peran penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Struktur tata kelola perusahaan meliputi organ utama yaitu Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi serta organ pendukung tata kelola perusahaan antara lain Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2022) mekanisme mengenai tata kelola perusahaan diharapkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh manajer mampu memberikan kepastian yang diharapkan oleh prinsipal. Pemegang saham sebagai prinsipal memiliki dua mekanisme tata kelola perusahaan, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah direksi yang terstruktur secara efektif, kompensasi dan kepemilikan terkonsentrasi mampu memantau atau memonitor secara aktif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh manajer atau agen. Mekanisme internal fokus pada peran direktur independen (sistem *one-tier*) atau dewan komisaris (sistem *two-tier*) sebagai mekanisme monitoring, adanya prinsip, aturan, regulasi dan insentif untuk agen sebagai komponen utama tata kelola perusahaan yang baik untuk menyelaraskan perilaku agen dengan kepentingan prinsipal dan mengurangi terjadinya asimetri informasi. Mekanisme eksternal adalah pasar yang mempunyai fungsi sebagai alat pengendali perusahaan jika mekanisme internal tidak berfungsi dengan baik atau gagal.

### 2.1.5.1 Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Hanya saja dewan komisaris tidak turut dalam mengambil keputusan operasional perusahaan. Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris berjalan secara efektif maka komposisi dewan komisaris harus memungkinkan mengambil keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak independen. Setiap perusahaan jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris dan 1 diantaranya diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris dan 1 lagi adalah komisaris independen. Komposisi dewan komisaris terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen yang terafiliasi artinya dewan komisaris tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris serta dengan perusahaan itu sendiri. Dewan komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 kali dalam 2

bulan dan rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari anggota dewan komisaris.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) direksi dalam suatu perusahaan merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi mempunyai tugas dan wewenang masing-masing namun tetap menjadi tanggung jawab bersama. Komposisi anggota direksi harus mampu untuk melakukan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Selain itu direksi bertanggung jawab untuk dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan perusahaan dapat berkelanjutan (*going concern*). Direksi dalam suatu perusahaan menentukan kebijakan yang akan diambil secara jangka pendek dan jangka panjang. Direksi mempunyai fungsi pengelolaan perusahaan yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Direksi yang menjalankan manajemen perusahaan tentunya mempertanggungjawabkan kinerjanya pada pemegang saham dengan cara bentuk laporan tahunan yang memuat laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan dan laporan pelaksanaan GCG. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS. Laporan tahunan harus tersedia dalam RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian. Diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota direksi.

Pertanggung jawaban direksi kepada RUPS ini merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

#### **2.1.5.2 Komisaris Independen**

Dewan komisaris dalam perusahaan diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dimana dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris, satu di antaranya adalah komisaris independen. Jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung ataupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Komisaris independen yang telah menjabat selama 2 periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang komisaris independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi komisaris independen ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. Komisaris independen menjabat komite audit, komisaris independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada komite audit untuk satu periode jabatan komite audit berikutnya.

### **2.1.5.3 Komite Audit**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Perusahaan publik atau emiten wajib memiliki komite audit, anggotanya paling sedikit terdiri dari tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan atau emiten. Komite audit ini diketuai oleh komisaris independen. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seperti berikut:

1. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



3. Memberikan pendapat independen dalam perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris.
7. Menelaah pegaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait adanya benturan kepentingan di perusahaan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Komite audit yang bertugas membantu dewan komisaris juga mempunyai tugas untuk memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006). Komite audit mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam setahun periode

keuangan. Rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari jumlah anggota. Setiap pembahasan rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang nantinya ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir lalu disampaikan kepada dewan komisaris. Selanjutnya tugas komite audit membuat laporan tahunan yang berisi laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

#### **2.1.6 Audit Internal**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Audit internal adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan meningkat nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan perusahaan publik wajib membentuk unit audit internal. Unit audit internal adalah unit kerja dalam perusahaan yang menjalankan fungsi audit internal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Unit audit internal mempunyai struktur dan kedudukan dalam perusahaan, sebagai berikut:

1. Unit audit internal terdiri dari satu orang auditor internal atau lebih.

2. Unit audit internal dipimpin oleh kepala unit audit internal.
3. Dalam hal unit audit internal terdiri dari satu orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala unit audit internal.
4. Jumlah auditor internal disesuaikan dengan besar dan tingkat kompleksitas perusahaan.
5. Kepala unit audit internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan dewan komisaris. Kepala unit audit internal bertanggung jawab kepada direktur utama.
6. Auditor internal dalam unit audit internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala unit audit internal.

Unit audit internal mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang. Unit audit internal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan penengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan komite audit
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit audit internal juga mempunyai wewenang, sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan fungsi dan tugasnya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan komite audit ataupun dengan anggota direksi, dewan komisaris dan komite audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan direksi, dewan komisaris dan komite audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan audit eksternal.

Perusahaan publik wajib memiliki Piagam Audit Internal sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 yang memuat tentang:

1. Struktur dan kedudukan unit audit internal.
2. Tugas dan tanggung jawab unit audit internal.
3. Wewenang unit audit internal.
4. Kode etik unit audit internal yang mengacu pada kode etik yang diterapkan oleh asosiasi audit internal yang ada di Indonesia atau kode etik audit internal yang lazim berlaku secara internasional.
5. Persyaratan auditor internal dalam unit audit internal.
6. Pertanggungjawaban unit audit internal.
7. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam unit audit internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan publik ataupun anak perusahaannya.

#### **2.1.7 Audit Eksternal**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, akuntan publik adalah seseorang yang memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Akuntan publik dalam memberikan jasanya diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) supaya sesuai ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik.

Perusahaan publik wajib membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh auditor eksternal atau akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS dari calon yang



diajukan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris melalui komite audit melakukan penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing perusahaan. Apabila diperlukan dalam penunjukan calon auditor maka dewan komisaris atau komite audit dapat meminta bantuan direksi. Pada saat rapat RUPS dewan komisaris wajib menyampaikan alasan pencalonan auditor tersebut dan berapa besar honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut. Auditor eksternal atau akuntan publik harus bebas dari pengaruh dewan komisaris, direksi dan pemangku kepentingan. Supaya mempermudah auditor eksternal dalam bekerja, perusahaan harus menyediakan catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga auditor bisa bekerja lebih optimal dalam memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-asasan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar akuntansi keuangan.

### **2.1.8 Biaya Audit**

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2016) biaya audit adalah imbalan jasa yang diterima oleh akuntan publik dari kliennya atas pemberian jasa audit. Hal ini diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia. Audit adalah jasa yang diberikan akuntan publik beserta tim perikatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan surat perikatan yang bertujuan untuk memberikan opini auditor independen yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Dalam penetapan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dalam jumlah yang sesuai dengan standar profesi akuntan publik yang berlaku dikarenakan apabila terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik. Hal inilah yang dilakukan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bertujuan untuk mewujudkan akuntan publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompetensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi akuntan publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan akuntan akuntan publik, serta mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia.

Akuntan publik atau KAP berhak mendapatkan imbalan jasa berdasarkan kesepakatan antara akuntan publik dengan kliennya sesuai dengan yang tertulis pada surat perikatan. Setiap anggota yang berindak sebagai rekan akuntan pada KAP harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya imbalan jasa yang diberikan oleh klien nantinya. Kebijakan tersebut mencakup:

1. Besaran tarif imbalan jasa standar per jam (*hourly charge out rate*) untuk masing-masing tingkatan staf auditor.
2. Kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tarif imbalan jasa standar.

3. Metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang akan ditagihkan kepada klien yang tertulis pada surat perikatan. Metode yang dapat digunakan bisa berupa: (1) jumlah keseluruhan yang bersifat lumpsom, (2) jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan, (3) jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan/atau minimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.

Dalam menetapkan imbalan jasa audit, anggota harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

1. Kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan.
2. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit.
3. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum.
4. Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan.
5. Tingkat kompleksitas pekerjaan.
6. Jumlah personil dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan.
7. Sistem pengendalian mutu kantor.
8. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

Penetapan tarif imbalan jasa harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing dengan memperhitungkan:

1. Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan yang mempunyai keahlian.
2. Imbalan lain diluar gaji.
3. Beban *overhead*, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan akuntan publik beserta staf, serta riset dan pengembangan.
4. Jumlah jam tersedia untuk periode tertentu akuntan publik, staf professional dan staf pendukung.
5. Marjin laba yang pantas.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Widiyanti & Prabowo (2008) meneliti pengaruh dari fungsi pengendalian internal dan struktur tata kelola perusahaan terhadap biaya audit. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2005-2007. Penelitian tersebut menemukan bahwa fungsi audit internal tidak mempengaruhi biaya audit, maupun komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya audit. Sedangkan pemegang saham mayoritas dan dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit.

Penelitian Rizqiasih (2010) meneliti pengaruh dari karakteristik struktur *governance*, seperti dewan komisaris dan komite audit terhadap biaya audit. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, intensitas rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan intensitas rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap biaya audit. Dewan komisaris independen dan komite audit independen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit.

Penelitian Hazmi & Sudarno (2013) meneliti pengaruh karakteristik dari struktur tata kelola perusahaan dan internal audit terhadap biaya audit. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2011. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, intensitas rapat dewan komisaris, komite audit independen, ukuran komite audit, dan intensitas rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap biaya audit, sedangkan ukuran dewan komisaris, dan internal audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit.

Penelitian Pratama & Cahyonowati (2015) meneliti pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan yang baik terhadap biaya auditor yang dibayarkan. Penelitian ini menggunakan sampel semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan auditor internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya auditor yang dibayarkan pada auditor eksternal, sedangkan frekuensi pertemuan dewan



komisaris dan frekuensi pertemuan komite audit tidak mempengaruhi biaya audit yang dibayarkan pada auditor eksternal.

Penelitian Chandra (2015) meneliti pengaruh faktor yang mempengaruhi penentuan terhadap biaya auditor eksternal. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 222 dari semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas pertemuan dewan komisaris, ukuran perusahaan, anak perusahaan, dan ukuran KAP mempengaruhi biaya audit yang dibayarkan pada auditor eksternal, sedangkan dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan komite audit, dan risiko perusahaan tidak mempengaruhi biaya audit yang dibayarkan pada auditor eksternal.

Penelitian Sitompul (2017) meneliti pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dan karakteristik perusahaan terhadap biaya auditor eksternal. Penelitian menggunakan sampel 174 data dari 29 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, ukuran KAP dan profitabilitas klien memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya audit, sedangkan intensitas pertemuan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya audit.

Penelitian Al-Najjar (2018) meneliti pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap biaya audit yang dibayarkan kepada auditor eksternal dalam

konteks UMKM di Inggris. Penelitian ini menggunakan sampel UMKM di Inggris dari databes FAME dengan 307 perusahaan non-keuangan pada tahun 2000-2009. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dewan komisaris independen, intensitas pertemuan komite audit, dan ukuran dewan komisaris terhadap biaya audit, sedangkan komite audit independen, intensitas pertemuan dewan komisaris tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya audit.

Penelitian Mame (2020) meneliti faktor-faktor tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan yang mempengaruhi penentuan biaya audit eksternal. Penelitian menggunakan sampel 488 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran auditor, dan kepemilikan asing memiliki hubungan yang signifikan terhadap biaya audit eksternal, sedangkan dewan komisaris independen, intensitas rapat komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya audit eksternal.

Penelitian Anandita & Wiliasti (2020) meneliti bukti empiris dari pengaruh tata kelola perusahaan yang baik yaitu dewan komisaris independen, komite audit independen, ukuran komite audit, intensitas pertemuan komite audit, dan internal audit terhadap biaya audit eksternal. Penelitian menggunakan sampel 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, dan internal audit memiliki pengaruh terhadap biaya audit eksternal, sedangkan komite audit independen, ukuran komite audit, dan intensitas pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap biaya audit eksternal.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Widiasari & Prabowo (2008)	Pengaruh pengendalian internal perusahaan dan struktur <i>corporate governance</i> terhadap <i>fee</i> audit	<p><b>Variabel Independen:</b> Fungsi audit internal, pemegang saham mayoritas, komite audit, dewan komisaris independen</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Fee</i> audit</p>	Fungsi audit internal tidak mempengaruhi biaya audit, maupun komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya audit. Sedangkan pemegang saham mayoritas dan dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit
2.	Rizqiasih (2010)	Pengaruh struktur <i>governance</i> terhadap <i>fee</i> audit eksternal	<p><b>Variabel Independen:</b> Dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, intensitas rapat dewan komisaris, komite audit independen, ukuran komite audit, intensitas rapat komite audit</p> <p><b>Variabel Kontrol:</b> Ukuran</p>	Ukuran dewan komisaris, intensitas rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan intensitas rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap biaya audit. Dewan komisaris independen dan komite audit independen mempunyai pengaruh positif dan signifikan

			<p>perusahaan, anak perusahaan, rasio utang atas aset, <i>return of assets</i> (ROA), rasio persediaan dan piutang atas aset perusahaan, kantor akuntan publik (KAP)</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Fee</i> audit</p>	terhadap biaya audit
3.	Hazmi & Sudarno (2013)	<p>pengaruh struktur <i>governance</i> dan <i>internal audit</i> terhadap <i>fee</i> audit eksternal pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang listing di BEI</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> Dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, intensitas rapat dewan komisaris, komite audit independen, ukuran komite audit, keahlian komite audit, internal audit</p> <p><b>Variabel Kontrol:</b> Ukuran perusahaan, anak perusahaan, <i>leverage</i>, <i>Return of Assets</i>, kantor akuntan publik</p>	<p>Dewan komisaris independen, intensitas rapat dewan komisaris, komite audit independen, ukuran komite audit, dan intensitas rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap biaya audit, sedangkan ukuran dewan komisaris, dan internal audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit</p>

			<b>Variabel Dependen:</b> <i>Fee</i> audit eksternal	
4	Pratama & Cahyonowati (2015)	Pengaruh mekanisme <i>good corporate governance</i> terhadap <i>fee</i> auditor eksternal	<b>Variabel Independen:</b> Dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, frekuensi pertemuan dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, auditor internal  <b>Variabel Kontrol:</b> Ukuran perusahaan, jumlah anak perusahaan, <i>Return of Assets, Debt Ratio</i> , rasio piutang dan persediaan terhadap aset, kantor akuntan publik  <b>Variabel Dependen:</b> <i>Fee</i> auditor eksternal	Dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan auditor internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya auditor yang dibayarkan pada auditor eksternal, sedangkan frekuensi pertemuan dewan komisaris dan frekuensi pertemuan komite audit tidak mempengaruhi biaya audit yang dibayarkan pada auditor eksternal
5.	Chandra (2015)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> , karakteristik perusahaan dan	<b>Variabel Independen:</b> Dewan komisaris independen,	Intensitas pertemuan dewan komisaris, ukuran



		ukuran kap terhadap <i>fee</i> audit eksternal	ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan dewan komisaris, intensitas pertemuan komite audit  <b>Variabel Kontrol:</b> Ukuran perusahaan, anak perusahaan, ukuran KAP, risiko perusahaan  <b>Variabel Dependen:</b> <i>Fee</i> audit	perusahaan, anak perusahaan, dan ukuran KAP mempengaruhi biaya audit yang dibayarkan pada auditor eksternal, sedangkan dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan komite audit, dan risiko perusahaan tidak mempengaruhi biaya audit yang dibayarkan pada auditor eksternal
6.	Sitompul (2017)	Pengaruh mekanisme <i>good corporate governance</i> dan karakteristik perusahaan terhadap audit <i>fee</i> eksternal	<b>Variabel Independen:</b> Dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan dewan komisaris, ukuran komite audit  <b>Variabel Kontrol:</b> Ukuran perusahaan, ukuran KAP, profitabilitas klien	Dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, ukuran KAP dan profitabilitas klien memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya audit, sedangkan intensitas pertemuan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan

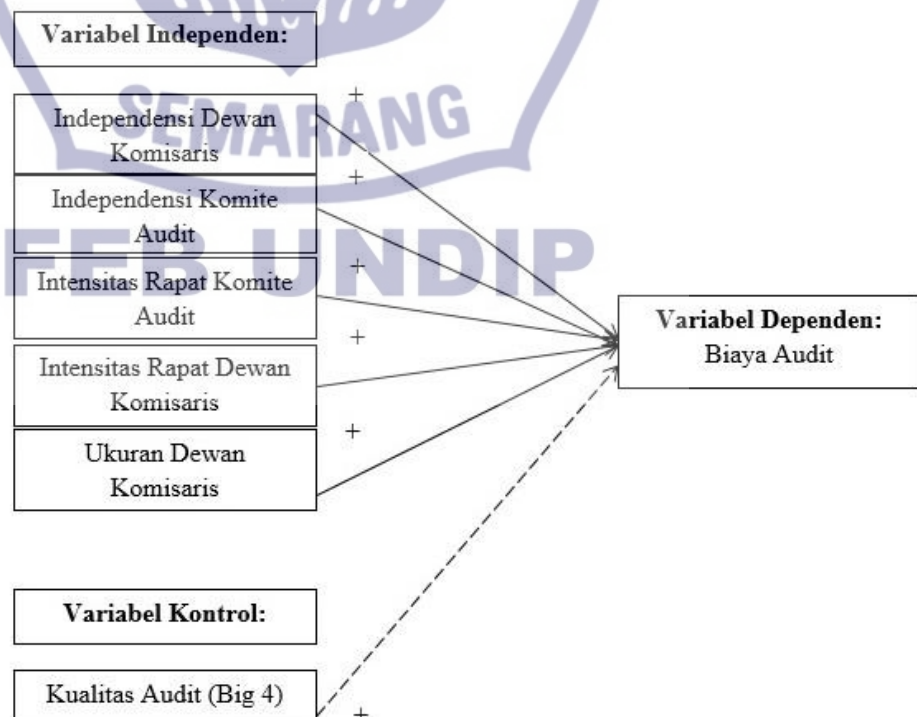
				terhadap biaya audit
7.	Al-Najjar (2018)	<i>Corporate governance and audit features: SMEs evidence</i>	<p><b>Variabel Independen:</b> Dewan komisaris independen, komite audit independen, intensitas pertemuan komite audit, intensitas pertemuan dewan komisaris, ukuran dewan komisaris</p> <p><b>Variabel Kontrol:</b> Kualitas audit (Big 4)</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Fee</i> audit</p>	Terdapat pengaruh positif independensi dewan komisaris, intensitas pertemuan komite audit, dan ukuran dewan komisaris terhadap biaya audit, sedangkan komite audit independen, intensitas pertemuan dewan komisaris tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya audit.
8.	Mame (2020)	Pengaruh tata kelola perusahaan, kualitas audit, dan struktur kepemilikan terhadap audit <i>fee</i>	<p><b>Variabel Independen:</b> Dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, intensitas rapat komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing</p> <p><b>Variabel Kontrol:</b> Ukuran</p>	Ukuran dewan komisaris, ukuran auditor, dan kepemilikan asing memiliki hubungan yang signifikan terhadap biaya audit eksternal, sedangkan dewan komisaris independen, intensitas rapat komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh

			<p>perusahaan, intensitas pertemuan dewan komisaris, anak perusahaan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Audit fee</i></p>	<p>signifikan terhadap biaya audit eksternal</p>
9.	Anandita & Wiliasti (2020)	<p>Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan internal audit terhadap <i>fee</i> audit eksternal (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014)</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> Dewan komisaris independen, komite audit independen, ukuran komite audit, intensitas pertemuan komite audit, internal audit</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Fee</i> audit eksternal</p>	<p>Dewan komisaris independen, dan internal audit memiliki pengaruh terhadap biaya audit eksternal, sedangkan komite audit independen, ukuran komite audit, dan intensitas pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap biaya audit eksternal</p>

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap biaya audit yang akan dibayarkan kepada auditor eksternal. Tata kelola perusahaan dalam penelitian ini mencakup dewan komisaris dan komite audit. Pada penelitian ini, selain menggunakan variabel dependen dan variabel independen juga akan menggunakan variabel kontrol untuk dapat menjelaskan keberadaan variabel dependen. Penelitian ini akan menggunakan satu variabel kontrol yaitu kualitas audit yang digambarkan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Biaya Audit

Rekomendasi dari Cadbury Report (1992) adalah memasukkan direktur independen ke dalam dewan. Di Indonesia rekomendasi ini adalah dengan memasukkan komisaris independen ke dalam dewan komisaris. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan komisaris dalam perusahaan diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dimana dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris, satu di antaranya adalah komisaris independen. Jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen membantu untuk memantau perusahaan agar pengendalian dan pengambilan keputusan menjadi efektif untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Komisaris independen membutuhkan hasil audit dari auditor eksternal yang berkualitas untuk menyampaikan pelaporan keuangan yang tepat. Oleh karena itu, diharapkan terdapat hubungan positif antara komisaris independen dan biaya audit Al-Najjar (2018). Menurut Lifschutz (2010) dewan komisaris yang independen menjadikan semakin baik tata kelola perusahaan tersebut karena akan meningkatkan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap kondisi keuangan. ,



perusahaan menuntut jaminan kualitas audit yang lebih baik dari auditor eksternal. Hal ini akan meningkatkan biaya audit yang dibayarkan perusahaan.

Penelitian Carcello et al., (2002); Hay et al., (2008); Johansen & Pettersson, (2013); Lifschutz (2010) membuktikan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara independensi dewan komisaris terhadap biaya audit.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mempertimbangkan hipotesis:

**H1 = Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap biaya audit.**

#### **2.4.2 Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Biaya Audit**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Perusahaan publik atau emiten wajib memiliki komite audit, anggotanya paling sedikit terdiri dari tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan atau emiten. Komite audit ini diketuai oleh komisaris independen. Menurut Cadbury Report (1992) pembentukan komite audit menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dikarenakan tugas yang dilakukan oleh komite audit memberikan kontrol dan pemantauan yang ketat untuk menghindari *fraud* atau salah saji dengan melibatkan auditor eksternal dikarenakan komite audit yang independen menuntut kualitas audit yang lebih tinggi karena berkaitan dengan perhatian besar terhadap kerugian moneter atau

hilangnya nama baik akibat terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan. Hal inilah yang menjadikan komite audit menuntut kualitas audit yang baik sehingga terjadi peningkatan biaya audit yang dibayarkan. DeAngelo (1981) menyatakan bahwa pekerjaan auditor adalah menemukan salah saji keuangan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki komite audit dan komisaris independen akan meningkatkan kualitas audit eksternal perusahaan dan pada akhirnya dapat meminimalkan risiko salah saji keuangan dan kecurangan yang menyebabkan biaya audit meningkat. Sesuai dengan penelitian Januarti et al (2020) bahwa pendekatan yang digunakan adalah perspektif *demand* yang menunjukkan bahwa biaya audit dibayarkan menjadi tinggi dikarenakan komite audit menginginkan perusahaan memiliki nilai tambah pada laporan keuangannya sehingga memilih kantor akuntan publik yang bereputasi tinggi. Terdapat bukti empiris bahwa komite audit independen berhubungan positif dengan biaya audit Al-Najjar (2018). Beasley et al (2000) menyatakan bahwa perusahaan dengan komite audit independen yang rendah cenderung mengalami kecurangan yang lebih tinggi.

Penelitian Abbott et al (2003) membuktikan bahwa komite audit independen meningkatkan pelaporan keuangan artinya semakin tinggi persentase komite audit independen maka semakin tinggi juga permintaan untuk audit ke pihak auditor eksternal sehingga semakin tinggi biaya audit yang dikeluarkan. Hasil penelitian Rizqiasih (2010) membuktikan bahwa komite audit independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap biaya audit.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mempertimbangkan hipotesis:

**H2 = Komite audit independen berpengaruh positif terhadap biaya audit.**

### **2.4.3 Pengaruh Intensitas Rapat Komite Audit terhadap Biaya Audit**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam setahun periode keuangan. Rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari jumlah anggota. Setiap pembahasan rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang nantinya ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir lalu disampaikan kepada dewan komisaris. Intensitas rapat komite audit diukur berapa kali komite audit mengadakan rapat dalam setahun. Raghunandan et al (2001) menyatakan bahwa intensitas rapat komite audit yang sering dapat menghasilkan proses audit yang lebih baik. Oleh karena itu, agar komite audit menjadi lebih efektif dan berfungsi dengan baik, maka dilakukan rapat secara berkala. Goodwin dan Kent (2006) menyatakan hubungan positif antara intensitas rapat komite audit dan biaya audit. Artinya, semakin sering komite audit mengadakan rapat maka semakin tinggi perusahaan menuntut menggunakan jasa audit yang lebih baik, sehingga menjadikan biaya audit lebih tinggi.

Hasil penelitian Al-Najjar (2018) intensitas rapat komite audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Goodwin-Stewart & Kent, 2006; Lifschutz, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mempertimbangkan hipotesis:

**H3 = Intensitas rapat komite audit berpengaruh positif terhadap biaya audit.**

#### **2.4.4 Pengaruh Intensitas Rapat Dewan Komisaris terhadap Biaya Audit**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 kali dalam 2 bulan dan rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari anggota dewan komisaris. Intensitas dewan komisaris diukur berapa kali dewan komisaris mengadakan rapat dalam setahun. Vafeas (1999) menyatakan bahwa efektivitas dewan komisaris dapat dilihat dari indeks intensitas rapat dewan komisaris yang tinggi, karena dewan komisaris yang sering mengadakan rapat dapat mengindikasikan lebih banyak pemantauan pada proses pelaporan keuangan, sehingga membutuhkan layanan audit yang berkualitas sehingga menjadikan biaya audit yang dibayarkan menjadi lebih tinggi.

Hasil penelitian Carcello et al (2002) dengan menyatakan bahwa dewan komisaris yang sering mengadakan rapat akan merasa ada tanggung jawab hukum dan juga berusaha melindungi reputasi dengan cara meminta layanan audit yang berkualitas sehingga akan meningkatkan biaya audit.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mempertimbangkan hipotesis:

**H4 = Intensitas rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap biaya audit.**

#### **2.4.5 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Biaya Audit**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris dan 1 diantaranya diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris dan 1 lagi adalah komisaris independen. Larmou & Vafeas (2010) menyatakan bahwa terhadap hubungan positif antara ukuran dewan dan nilai perusahaan. Sehingga, ukuran dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam memantau dan mengawasi kinerja manajemen. Semakin besar ukuran dewan komisaris maka ada kemungkinan terdapat kesulitan dalam mengkoordinasikan dewan komisaris sehingga mengakibatkan tidak efektifnya pengawasan terhadap pelaporan keuangan. Hal ini menyebabkan auditor eksternal membutuhkan waktu untuk melakukan tugasnya, dan dapat meningkatkan biaya audit yang lebih besar.

Hasil penelitian Al-Najjar (2018) membuktikan bahwa perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang lebih besar cenderung memberikan tekanan lebih pada sistem pelaporan audit yang komprehensif sehingga membutuhkan lebih banyak jaminan audit dari pihak auditor eksternal yang mengakibatkan meningkatnya biaya audit yang dibayarkan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Vafeas & Waegelein, 2007).



Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mempertimbangkan hipotesis:

**H5 = Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap biaya audit.**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya audit. Biaya audit atau *audit fee* menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2016) adalah imbalan jasa yang diterima oleh akuntan publik dari kliennya atas pemberian jasa audit. Hal ini diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia. Data tentang biaya audit diambil dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2022 yang mengungkapkan besaran jumlah biaya audit dalam laporan tahunan perusahaan. Variabel akan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari biaya audit atau *audit fee*. Logaritma natural digunakan untuk memperkecil perbedaan angka yang terlalu jauh dari data yang didapatkan sebagai sampel penelitian. Selanjutnya variabel ini akan dilambangkan dengan LN $FEE$  di dalam persamaan.

##### **3.1.2 Variabel Independen**

###### **3.1.2.1 Dewan Komisaris**

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) dewan komisaris sebagai organ perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta arahan kepada direksi untuk memastikan perusahaan

melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik tetapi tidak dibolehkan untuk andil mengambil keputusan operasional. Variabel dewan komisaris akan dijabarkan dengan hipotesis bahwa dewan komisaris memiliki komisaris independen, memiliki anggota sesuai kompleksitas perusahaan, dan mengadakan rapat secara berkala. Komisaris independen diukur melalui persentase total komisaris independen terhadap total dewan komisaris dalam perusahaan. Intensitas rapat diukur melalui jumlah total rapat yang dilakukan dewan komisaris selama periode akuntansi. Ukuran dewan komisaris diukur melalui total dewan komisaris yang ada pada perusahaan. Untuk selanjutnya, komisaris independen akan dilambangkan dengan InDir, intensitas rapat dilambangkan dengan BMeet, dan ukuran dewan komisaris akan dilambangkan dengan BSize.

### **3.1.2.2 Komite Audit**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Variabel komite audit akan dihitung dengan ketentuan jumlah komite audit di luar komisaris independen, memiliki anggota dan mengadakan rapat. Komite audit yang independen diukur melalui persentase total komisaris independen terhadap total komite audit dalam perusahaan. Intensitas rapat diukur melalui jumlah total rapat yang dilakukan komite audit selama periode akuntansi. Untuk selanjutnya, komite audit independen akan dilambangkan dengan AudInd, intensitas rapat dilambangkan dengan AudMeet.

### 3.1.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol sebagai pengontrol variabel independen dalam menjelaskan keberadaan variabel dependen sehingga tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Tujuan digunakan variabel kontrol adalah untuk menghindari unsur bias pada hasil penelitian dan dapat meminimalisir bias yang terjadi. Pada penelitian ini terdapat satu variabel kontrol yaitu kualitas audit (Big4).

#### 3.1.3.1 Kualitas Audit (Big4)

Menurut Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Kantor akuntan publik sering dikategorikan menurut ukurannya, seperti kantor akuntan publik yang memiliki nama besar disebut (Big4) dipandang menghasilkan tingkat kualitas audit yang lebih dibanding dengan kantor akuntan publik yang bukan atau disebut sebagai (non Big4). KAP Big 4 dianggap memiliki tingkat kompetensi yang mumpuni dibandingkan dengan non Big 4 karena Big 4 mampu memiliki banyak auditor yang mempunyai pengalaman yang lebih dan memiliki teknologi informasi yang tinggi. KAP Big 4 akan berusaha bekerja secara profesional karena para auditor menyandang nama besar kantor mereka.

KAP Big 4 menawarkan layanan jaminan yang berkualitas tinggi untuk mengurangi risiko salah saji keuangan, sehingga akan meningkatkan biaya audit.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan menuntut kualitas yang lebih baik, sehingga mempengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih menggunakan jasa kantor akuntan publik Big 4 atau non Big 4 (Al-Najjar, 2018).

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk The Big 4 yaitu:

1. KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja yang berafiliasi dengan Ernst and Young (E & Y).
2. KAP Haryanto Sahari & Co. yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC).
3. KAP Osman Bing Satrio & Co. yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Thomatsu (DTT).
4. KAP Siddharta, Siddharta dan Widjaja yang berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

Variabel ini menggunakan variabel *dummy*, yaitu angka 1 untuk mengindikasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik Big 4 lalu angka 0 untuk mengindikasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik Non Big 4. Selanjutnya variabel ini akan dilambangkan dengan Big4 dalam persamaan.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive*



*sampling*) dengan tujuan mendapatkan sampel yang *representative* sesuai kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2022.
2. Perusahaan tidak mengalami *delisting* selama periode pengamatan.
3. Perusahaan menyertakan laporan tahunan beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen selama periode 2014-2022.
4. Perusahaan mencantumkan besaran biaya audit dalam mata uang Rupiah pada laporan tahunan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara lain (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) disebut data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang terkumpul yang tersusun rapi dalam arsip (data dokumenter) yang bisa dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada alasan berikut: (1) mudah didapatkan, (2) menghemat biaya dan waktu pengumpulan, (3) penggunaan laporan tahunan yang telah terdaftar di BEI merupakan data yang akurat dan terpercaya. Data diperoleh dari laporan tahunan pada *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan beberapa dari *website* resmi perusahaan manufaktur untuk periode 2014-2022.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumenter. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengambil data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari institusi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), *website* resmi perusahaan manufaktur tersebut dan database Bloomberg Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

### **3.5 Metode Analisis**

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif menurut Ghozali (2018) digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data dari sudut pandang terkait rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, rentang (range), kurtosis, dan skewness. Pada penelitian ini statistik deskriptif akan memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum dari variabel penelitian yaitu biaya audit, tata kelola perusahaan, dan kantor akuntan publik sesuai sampel yang digunakan.

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan sebagai persyaratan statistik untuk mengetahui apakah data penelitian bisa dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda, sehingga dapat memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi. Penentuan keakuratan model, beberapa asumsi harus dilakukan pengujian atas asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, heterokedastisitas dan uji autokorelasi (Ghozali, 2018).

### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak. Terdapat indikator model regresi yang baik adalah yang memiliki data berdistribusi normal. Salah satu prosedur uji normalitas dalam mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov (KS).

Apabila menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov (KS) dilakukan dengan cara membuat hipotesis:

$H_0$ : data residual terdistribusi normal

$H_a$ : data residual tidak terdistribusi normal

Keputusan yang diambil pada *one sample* Kolmogrov-Smirnov (KS) didasarkan pada nilai profitabilitas signifikan dari data residualnya. Jika nilai profitabilitas signifikannya  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai profitabilitas signifikannya  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.

### 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menurut Ghozali (2018) adalah model regresi apakah ada korelasi antar variabel independen. Sehingga perlu dilakukan uji multikolinearitas untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen atau dapat dikatakan bebas dari gejala

multikolinearitas. Ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat diketahui dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Nilai VIF dan nilai *tolerance* menunjukkan setiap variabel independen mana yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi ( $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai yang menunjukkan adanya multikolinearitas adalah apabila nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan  $VIF \geq 10$  atau sebaliknya apabila nilai *tolerance*  $\geq 0,1$  dan  $VIF \leq 10$  maka model regresi dapat dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas.

#### 3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas menurut Ghozali (2018) bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Menandakan bahwa model regresi tersebut baik, artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui pola grafik *scatterplot*, uji *park*, uji *white* dan uji *glejser*.

Pengujian ini dilakukan dengan uji *glejser* yaitu dengan meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikannya  $> 0,05$  berarti data yang digunakan tidak ada heterokedastisitas.

#### 3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menurut Ghozali (2018) bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) dalam model regresi linear. Tidak

adanya autokorelasi pada regresi menandakan bahwa model regresi tersebut baik. Ada dua prosedur untuk mendeteksi ada atau tidak autokorelasi yaitu dengan *Run Test* dan *Durbin Watson*.

*Run Test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik juga dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antar residual. Untuk mengetahui bahwa model regresi tersebut tidak terjadi autokorelasi maka nilai signifikansi menunjukkan lebih dari 5%.

*Durbin Watson* merupakan salah satu uji dalam autokorelasi. Data dikatakan tidak ada autokorelasi jika nilai Durbin Watson berada diantara dua dan empat.

### 3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi berganda, hal ini dikarenakan variabel independen yang digunakan lebih dari satu. Analisis yang digunakan untuk menemukan hubungan variabel dependen yaitu biaya audit dengan variabel-variabel independen. Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\text{LNFee} = \beta_0 + \beta_1 \text{InDir}_{it} + \beta_2 \text{AuInd}_{it} + \beta_3 \text{AudMeet}_{it} + \beta_4 \text{BMeet}_{it} + \beta_5 \text{BSize}_{it} \\ + \beta_6 \text{Big4}_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

$\beta_0$  : Intercept

$\beta_1 - \beta_6$  : Koefisien regresi dari tiap variabel-variabel independen



LNFee	: Logaritma natural dari biaya audit
InDir	: Dewan komisaris independen yang diukur dengan persentase dari jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris
AuInd	: Komite audit independen yang diukur dengan persentase komisaris independen dalam komite audit
AudMeet	: Rapat komite audit yang diukur dari jumlah rapat komite audit dalam setahun
BMeet	: Rapat dewan komisaris yang diukur dari jumlah rapat dewan komisaris dalam setahun
BSize	: Ukuran dewan yang diukur dari jumlah dewan komisaris
Big4	: Kantor Akuntan Publik (angka 1 menunjukkan penggunaan KAP Big 4 dan angka 0 menunjukkan penggunaan KAP non Big 4)
$\varepsilon$	: <i>Error</i>

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel independen yaitu biaya audit maka dilakukan uji hipotesis terhadap variabel tersebut dengan pengujian sebagai berikut:

a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang digunakan dengan mengukur kemampuan model seberapa jauh dalam menjelaskan variasi variabel dependen, dengan nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  kecil berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel independen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan semua informasi yang diperlukan dalam memprediksi variasi variabel dependen. Untuk regresi

dengan lebih dari 2 variabel independen, digunakan *adjusted R<sup>2</sup>* sebagai koefisien determinasi. (Ghozali, 2018).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F sebagai uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model itu berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai statistik uji F dapat digunakan untuk menentukan keakuratan fungsi regresi sampel ketika menaksir nilai actual atau nilai sebenarnya yang diukur dari *Goodness of Fit*-nya. Hipotesis yang akan diuji dalam uji F adalah  $H_0$ : variabel independen tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen ( $b_1 = b_2 = \dots b_k = 0$ ),  $H_a$ : variabel independen berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen ( $b_1 = b_2 = \dots b_k \neq 0$ ). Nilai signifikansi F yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 atau 5%. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F, yaitu (Ghozali, 2018):

1. *Quick look*: Jika nilai F lebih besar dari 4 maka  $H_0$  dapat ditolak pada tingkat 5% atau artinya bisa menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersamaan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

2. Membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai nilai F tabel, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai signifikansi pada uji t sebesar  $\alpha=5\%$ . Uji t dapat dilakukan dengan *quick look*, jika nilai signifikansi  $t < 0,05$ , maka ada hipotesis alternatif yang diterima yang berarti variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018).



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2022. Metode pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan memilih sampel sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Berikut kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan sampel:

1. Semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2022.
2. Perusahaan yang mengungkapkan besaran biaya audit yang dicantumkan pada laporan tahunan.
3. Laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel-variabel penelitian.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Seleksi Sampel berdasarkan Metode *Purposive Sampling***

No	Kriteria Sampel Penelitian	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2022	1711
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak mencantumkan besaran biaya audit pada laporan tahunan	(768)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap untuk seluruh variabel penelitian	(26)
4.	Data outlier	(587)
	Total	330

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu besaran biaya audit yang dibayarkan perusahaan, persentase komisaris independen dalam dewan komisaris, persentase komisaris independen dalam komite audit, jumlah rapat komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah dewan komisaris, dan ukuran kantor akuntan publik. Data tersebut diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), database *Bloomberg* dan *website* resmi perusahaan tersebut.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Ghozali (2018) digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data dari sudut pandang terkait rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum. Berikut ini merupakan hasil statistik deskriptif akan memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar



deviasi, maksimum, dan minimum dari variabel penelitian yaitu biaya audit, tata kelola perusahaan, dan kantor akuntan publik sesuai sampel yang digunakan.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif Tahun 2014-2022**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	330	.0000	1.0000	.379553	.0907440
Komite Audit Independen	330	.0000	1.0000	.346134	.0867749
Intensitas Rapat Komite Audit	330	1	16	5.15	2.420
Intensitas Rapat Dewan Komisaris	330	1	38	6.37	4.130
Ukuran Dewan Komisaris	330	2	10	4.05	1.746
Big4 (Kantor Akuntan Publik)	330	0	1	.46	.499
LNFee (Biaya Audit)	330	Rp50.000.000,00	Rp19.300.000.000,00	Rp1.411.658.330,00	1.18740
Valid N (listwise)	330				

Sumber: Data sekunder yang diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa dari 330 total observasi perusahaan manufaktur dari tahun 2014-2022 yang menjadi sampel. Nilai minimal dan maksimal dari variabel Dewan komisaris independen adalah 0 dan 1, serta rata-ratanya adalah sebesar 0,37 atau 37% dengan standar deviasi sebesar 0,09. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata komisaris independen pada perusahaan sebesar 37% dari total dewan komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Nilai minimal dan maksimal dari variabel Komite audit independen adalah 0 dan 1, serta rata-ratanya sebesar 0,34 atau 34% dengan standar deviasi sebesar 0,86. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah komisaris independen pada perusahaan sebesar 34% dari total komite audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota dimana ketua komite audit adalah komisaris independen dan 2 orang anggota lainnya berasal dari pihak luar perusahaan.

Nilai rata-rata dari variabel Intensitas Rapat Komite Audit sebesar 5,15 dengan standar deviasi sebesar 2,42. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas rapat komite audit rata-rata melakukan rapat sebanyak 5 kali dalam setahun. Nilai minimal intensitas rapat komite audit sebanyak 1 kali dalam setahun dan nilai maksimal dari intensitas rapat komite audit sebanyak 16 kali dalam setahun. Artinya, komite audit dapat melakukan rapat dalam setahun bisa hanya sebanyak 1 kali dalam setahun.

Nilai rata-rata Intensitas Rapat Dewan Komisaris sebesar 6,37 dengan standar deviasi sebesar 4,13. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas rapat dewan komisaris rata-rata melakukan rapat sebanyak 6 kali dalam setahun. Nilai minimal intensitas rapat dewan komisaris sebanyak 1 kali dalam setahun dan nilai maksimal

dari intensitas rapat dewan komisaris sebanyak 38 kali dalam setahun. Artinya, dewan komisaris pernah melakukan rapat dalam setahun bisa hanya sebanyak 1 kali dalam setahun.

Nilai rata-rata dari variabel Ukuran Dewan Komisaris sebesar 4,05 dengan standar deviasi sebesar 1,746. Nilai minimal dan maksimal dari ukuran dewan ini sebesar 2 dan 10. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata dalam sebuah perusahaan memiliki 4 orang dewan komisaris.

Nilai rata-rata variabel Big4 (Kantor Akuntan Publik) adalah sebesar 0,46. Nilai minimal dan maksimal sebesar 0 dan 1. Variabel ini adalah variabel dummy dimana nilai minimal 0 berarti perusahaan tidak menggunakan jasa KAP Big4, lalu sebaliknya nilai maksimal 1 berarti perusahaan menggunakan jasa KAP Big4.

Dari tahun 2014-2022 variabel LNFee (Biaya Audit) memiliki rata-rata sebesar 20,191 berarti auditor mendapatkan biaya audit untuk jasanya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan secara rata-rata sebesar Rp.1.411.658.330,00. Perusahaan yang membayarkan biaya audit terendah sebesar 17,73 atau Rp.50.000.000 yaitu PT. Eterindo Wahanatama Tbk dengan ticker ETWA pada tahun 2021. Sedangkan, perusahaan yang membayarkan biaya audit tertinggi sebesar 23,68 atau Rp19.300.000.000 yaitu PT. Dharma Satya Nusantara Tbk dengan ticker DSNG pada tahun 2022.

#### **4.2.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik**

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda sehingga memerlukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik

terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan autokorelasi.

#### 4.2.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak. Salah satu prosedur uji normalitas dalam mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (KS).

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Normalitas**

Tests of Normality			
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.049	330	.054
a. Lilliefors Significance Correction			

Sumber: Data sekunder yang diolah (2023)

Berdasarkan perhitungannya diperoleh signifikansi dari uji Kolmogorov-Smirnov (KS) sebesar  $0,054 > 0,05$  yang artinya residual data berdistribusi normal.

#### 4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut (Ghozali, 2018) ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dapat diketahui dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Nilai VIF dan nilai *tolerance* menunjukkan setiap variabel independen mana yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang menunjukkan tiadanya multikolinieritas adalah apabila nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan

VIF  $\geq 10$  atau sebaliknya apabila nilai *tolerance*  $\geq 0,1$  dan VIF  $\leq 10$  maka model regresi dapat dikatakan bebas dari gejala multikolinieritas.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dewan Komisaris Independen	.927	1.078
Komite Audit Independen	.862	1.160
Intensitas Rapat Komite Audit	.964	1.038
Intensitas Rapat Dewan Komisaris	.938	1.066
Ukuran Dewan Komisaris	.635	1.575
Big4 ( Kantor Akuntan Publik)	.725	1.379

a. Dependent Variable: LNFee (Biaya Audit)

Sumber: Data sekunder yang diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui semua variabel independen memiliki nilai *tolerance*  $\geq 0,1$  dan VIF  $\leq 10$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinieritas.

#### 4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas menurut Ghozali (2018) bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Menandakan bahwa model regresi tersebut baik, artinya tidak terjadi heterokedastisitas.



**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Glejser**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.323	.187
	Dewan Komisaris Independen	1.957	.051
	Komite Audit Independen	1.725	.086
	Intensitas Rapat Komite Audit	-1.273	.204
	Intensitas Rapat Dewan Komisaris	-.597	.551
	Ukuran Dewan Komisaris	1.903	.058
	Big4 ( Kantor Akuntan Publik)	-1.184	.237

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Sumber: Data sekunder yang diolah (2023)

Semua variabel independen memiliki nilai signifikansi  $> 5\%$ , sehingga dapat disimpulkan varian data tidak bersifat heterokedastisitas.

#### 4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menurut Ghozali (2018) bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) dalam model regresi linear. Tidak adanya autokorelasi pada regresi menandakan bahwa model regresi tersebut baik.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Run Test**

<b>Runs Test</b>	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.07532
Cases < Test Value	165
Cases >= Test Value	165
Total Cases	330
Number of Runs	189
Z	1.536
Asymp. Sig. (2-tailed)	.061
a. Median	

Sumber: Data sekunder yang diolah (2023)

Hasil pengujian autokorelasi dengan uji *Run Test* diperoleh hasil  $0,61 > 5\%$ , artinya tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Durbin Watson**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>	
Model	Durbin-Watson
1	2.136
a. Predictors: (Constant), Big4, InDir, AuInd, AudMeet, BMeet, BSize	
b. Dependent Variable: LNFee	

Sumber: Data sekunder yang diolah (2023)

Nilai durbin Watson sebesar 2,136, nilai tersebut terletak diantara du  $(1,85653) < 2,136 < 4$ -du  $(2,14347)$ , dengan k (jumlah parameter termasuk intercept) = 7 dan N (jumlah observasi) = 330. Artinya, tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi, sehingga uji dapat dilanjutkan.

### 4.2.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi berganda, hal ini dikarenakan variabel independen yang digunakan lebih dari satu. Analisis yang digunakan untuk menemukan hubungan variabel dependen yaitu biaya audit dengan variabel-variabel independen. Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\text{LNFee} = \beta_0 + \beta_1 \text{InDir}_{it} + \beta_2 \text{AuInd}_{it} + \beta_3 \text{AudMeet}_{it} + \beta_4 \text{BMeet}_{it} + \beta_5 \text{BSize}_{it} + \beta_6 \text{Big4}_{it} + \epsilon_{it}$$

#### 4.2.3.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang digunakan dengan mengukur kemampuan model seberapa jauh dalam menjelaskan variasi variabel dependen, dengan nilai koefisien determinasi antara nol dan satu.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 <sup>a</sup>	.717	.712	.63745
a. Predictors: (Constant), Big4, InDir, AuInd, AudMeet, BMeet, BSize				
b. Dependent Variable: LNFee				

Sumber: Data sekunder yang diolah (2023)

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,717 atau sebesar 71,7%. Artinya, kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar

71,7%. Sedangkan sisanya sebesar 28,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian.

#### 4.2.3.2 Uji F

Uji F sebagai uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model itu berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	332.620	6	55.437	136.430	.000 <sup>b</sup>
	Residual	131.247	323	.406		
	Total	463.866	329			
a. Dependent Variable: LNFee						
b. Predictors: (Constant), Big4, InDir, AuInd, AudMeet, BMeet, BSize						

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2023)

Nilai signifikansi pada uji F sebesar  $0,00 < 5\%$ , sehingga disimpulkan bahwa model penelitian *fit* layak digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen. Artinya, variabel independen berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen.

#### 4.2.3.4 Uji t

Uji t dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel independen.

Semua variabel independen memiliki nilai sig < 5%, kecuali pada variabel intensitas rapat dewan komisaris. maka dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen, komite audit independen, intensitas rapat komite audit, ukuran dewan komisaris, dan Big4 (Kantor Akuntan Publik) masing-masing signifikan mempengaruhi variabel LNFee (Biaya Audit) atau menerima hipotesis yang diajukan, sedangkan pada variabel intensitas rapat dewan komisaris tidak mempengaruhi atau menolak hipotesis yang diajukan.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.168	.234		73.258	.000
Dewan Komisaris Independen	1.122	.402	.086	2.790	.006
Komite Audit Independen	1.538	.436	.112	3.525	.000
Intensitas Rapat Komite Audit	.036	.015	.073	2.423	.016
Intensitas Rapat Dewan Komisaris	.006	.009	.023	.739	.460
Ukuran Dewan Komisaris	.333	.025	.489	13.169	.000
Big4 (Kantor Akuntan Publik)	1.061	.083	.446	12.835	.000

a. Dependent Variable: LNFee (Biaya Audit)

Sumber: Data sekunder yang diolah (2023)



### **4.3 Interpretasi Hasil**

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian antara pengaruh dewan komisaris independen, komite audit independen, intensitas rapat komite audit, intensitas rapat dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan Big4 (Kantor Akuntan Publik) terhadap biaya audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2014-2022.

#### **4.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Biaya Audit**

Dari tabel 4.10 diketahui variabel dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dengan koefisien 1,122 dan signifikansi 0,006 di bawah 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan karena terdapat pengaruh positif yang signifikan antara dewan komisaris independen dengan biaya audit. Dari hasil pengujian statistik diketahui bahwa variabel dewan komisaris independen terbukti mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap biaya audit.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Al-Najjar (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit dikarenakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen dalam keanggotaan dewan komisaris maka semakin baik peran tata kelola perusahaan sehingga lebih meningkatkan kontrol dan pemantauan secara ketat terhadap kondisi keuangan perusahaan, akan menyebabkan adanya tuntutan untuk audit lebih lanjut dari auditor eksternal tentunya biaya audit menjadi meningkat.

#### **4.3.2 Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Biaya Audit**

Dari tabel 4.10 diketahui variabel komite audit independen memiliki pengaruh positif dengan koefisien 1,538 dan signifikansi 0,000 di bawah 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan karena komite audit independen mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap biaya audit. Dari hasil pengujian statistik diketahui bahwa variabel komite audit independen mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap biaya audit.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abbott et al., (2003); Rizqiasih, (2010) bahwa semakin tinggi persentase komite audit independen maka semakin tinggi permintaannya terhadap jasa audit dari auditor eksternal sehingga semakin tinggi biaya audit yang dibayarkan.

#### **4.3.3 Pengaruh Intensitas Rapat Komite terhadap Biaya Audit**

Dari tabel 4.10 diketahui variabel intensitas rapat komite audit memiliki pengaruh positif dengan koefisien 0,036 dan signifikansi 0,016 di bawah 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan karena intensitas rapat komite audit mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap biaya audit. Dari hasil pengujian statistik diketahui bahwa variabel intensitas rapat komite audit mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap biaya audit.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Al-Najjar (2018) bahwa intensitas rapat komite audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Goodwin dan Kent (2006); Lifschutz (2010) bahwa semakin sering intensitas rapat komite audit yang dilakukan, maka semakin baik proses pengawasan dan koordinasinya untuk menghindari risiko penipuan keuangan atau *fraud* yang membutuhkan peranan penting pihak ketiga yang independen yaitu auditor eksternal, sehingga mengakibatkan biaya audit meningkat.

#### **4.3.4 Pengaruh Intensitas Rapat Dewan Komisaris terhadap Biaya Audit**

Dari tabel 4.10 diketahui variabel intensitas rapat dewan komisaris memiliki pengaruh positif dengan koefisien 0,006 dan signifikansi 0,460 di atas 0,05. Hasil ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini disebabkan intensitas rapat dewan komisaris tidak mempengaruhi hasil audit, oleh karena itu tidak terdapat pengaruh terhadap biaya audit.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Al-Najjar (2018); Rizqiasih, (2010); Yatim et al., (2006) bahwa intensitas rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya audit. Hal ini disebabkan rapat yang dilakukan dewan komisaris tidak mempengaruhi bagaimana kualitas audit mengakibatkan tidak mempengaruhi biaya audit.

#### **4.3.5 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Biaya Audit**

Dari tabel 4.10 diketahui variabel ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif dengan koefisien 0,333 dan signifikansi 0,000 di bawah 0,05. Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan. Dari hasil pengujian statistic diketahui bahwa variabel ukuran dewan komisaris terbukti mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap biaya audit.

Penelitian ini mendukung penelitian Al-Najjar (2018) bahwa perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang lebih besar cenderung memberikan tekanan lebih pada sistem pelaporan audit yang komprehensif sehingga membutuhkan lebih banyak jaminan audit dari pihak auditor eksternal yang mengakibatkan meningkatnya biaya audit yang dibayarkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dalam pembahasan yang dilakukan, maka kesimpulan yang data diambil adalah:

1. Dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit. Sebagai bagian dari salah satu organ perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan serta menjadi tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan. Sehingga menjadikan komisaris independen akan meningkatkan permintaan untuk terhadap jasa audit eksternal yang lebih baik yang mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya audit.
2. Komite audit independen berpengaruh secara signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit. Hal ini dikarenakan semakin tinggi persentase komite audit independen maka semakin tinggi permintaannya terhadap jasa audit dari auditor eksternal sehingga semakin tinggi biaya audit yang dibayarkan.
3. Intensitas rapat komite audit berpengaruh secara signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit. Hal ini dikarenakan semakin sering intensitas rapat komite audit yang dilakukan, maka semakin baik proses pengawasan dan koordinasinya untuk menghindari risiko



penipuan keuangan atau *fraud* yang membutuhkan peranan penting pihak ketiga yang independen yaitu auditor eksternal, sehingga mengakibatkan biaya audit meningkat.

4. Intensitas rapat dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya audit. Hal ini dikarenakan rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak mempengaruhi kualitas audit sehingga tidak mempunyai pengaruh terhadap biaya audit.

5. Ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang lebih besar cenderung memberikan tekanan lebih pada sistem pelaporan audit yang komprehensif sehingga membutuhkan lebih banyak jaminan audit dari pihak auditor eksternal yang mengakibatkan meningkatnya biaya audit yang dibayarkan.

## **5.2 Keterbatasan**

Keterbatasan yang teridentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Keterbatasan data terkait biaya audit, dikarenakan tidak semua perusahaan mencantumkan besaran biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan.
2. Keterbatasan data terkait biaya audit, dikarenakan masih terdapat beberapa perusahaan yang menggabungkan seluruh biaya pada lembaga penunjang perusahaan.

3. Keterbatasan terkait salah satu aspek pendukung tata kelola perusahaan yaitu intensitas rapat dewan komisaris dan rapat komite audit tidak semua perusahaan mencantumkan berapa kali masing-masing organ perusahaan mengadakan rapat dalam tahun buku.

### 5.3 Saran

Mengacu kepada beberapa keterbatasan, saran untuk penelitian mendatang sebagai berikut:

1. Koefisien determinasi di dalam penelitian ini adalah sebesar 71,7%, sedangkan sisanya sebesar 28,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian. Maka masih terdapat variabel lain yang perlu diidentifikasi untuk menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan biaya audit. Oleh karena itu, untuk penelitian mendatang diharapkan dapat mempertimbangkan variabel-variabel lainnya seperti mekanisme tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

**FEB UNDIP**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L. J., Parker, S., Peters, G. F., & Raghunandan, K. (2003). The association between audit committee characteristics and audit fees. *Auditing*, 22(2), 17–32. <https://doi.org/10.2308/aud.2003.22.2.17>
- Al-Najjar, B. (2018). Corporate governance and audit features: smes evidence. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 25(1), 163–179. <https://doi.org/10.1108/JSBED-08-2017-0243>
- Anandita, A., & Wiliasti, A. (2020). *Pengaruh independensi dewan komisaris , komite audit , dan internal audit terhadap fee audit eksternal*. 9(September), 92–97.
- Beasley, M. S. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *The Accounting Review*, 71(Oct), 443–465.
- Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Lapides, P. D. (2000). Fraudulent financial reporting in china : consideration of timing traits and corporate governance mechanisms. *Accounting Horizons*, 14(December), 441–454.
- Cadbury Report. (1992). *The financial aspects of corporate governance*.
- Carcello, J. V., Hermanson, D. R., Neal, T. L., & Riley, R. A. (2002). Board characteristics and audit fees. *Contemporary Accounting Research*, 19(3), 365–384. <https://doi.org/10.1506/CHWK-GMQ0-MLKE-K03V>
- Chandra, M. O. (2015). *Pengaruh good corporate governance, karakteristik perusahaan dan ukuran kap terhadap fee audit eksternal*. XIII(26 Maret), 174–194.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit fees. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199.
- Fadhil Izzani, A., & Khafid, M. (2022). Pengaruh dewan komisaris, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, dan risiko perusahaan terhadap audit fee. *Business and Economic Analysis Journal*, 2(1), 1–13.
- Fahrie, M. H., & Hakim, M. Z. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, risiko perusahaan, dan profitabilitas klien terhadap audit fee. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 361–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.388>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goodwin-Stewart, J., & Kent, P. (2006). The relation between external audit fees, internal audit and the audit committee. *Accounting and Finance*, 46(13), 387–

404.

- Hay, D., Knechel, W. R., & Ling, H. (2008). Evidence on the impact of internal control and corporate governance on audit fees. *International Journal of Auditing*, 12(1), 9–24. <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2008.00367.x>
- Hazmi, M. Al, & Sudarno. (2013). *Pengaruh struktur governance dan internal audit terhadap fee audit eksternal pada perusahaan- perusahaan manufaktur yang listing di bei*. 2(2), 1–13.
- Psak 1 Penyajian laporan keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia 1 (2015). <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-1.pdf>
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2016). *Peraturan pengurus no 2 tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan*.
- Januarti, I., Darsono, D., & Chariri, A. (2020). The relationship between audit committee effectiveness and audit fees: insights from indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 179–185. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.179>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Johansen, T. R., & Pettersson, K. (2013). The impact of board interlocks on auditor choice and audit fees. *Corporate Governance: An International Review*, 21(3), 287–310. <https://doi.org/10.1111/corg.12013>
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman umum good corporate governance indonesia*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2022). *Pedoman umum governansi sektor publik indonesia*.
- Kusumajaya, A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi fee audit eksternal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2015. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 167–185.
- Larmou, S., & Vafeas, N. (2010). The relation between board size and firm performance in firms with a history of poor operating performance. *Journal of Management and Governance*, 14(1), 61–85. <https://doi.org/10.1007/s10997-009-9091-z>
- Lifschutz, S. (2010). Corporate governance characteristics and external audit fees: a study of large public companies in israel. *International Journal of Business and Management*, 5(3), 109–116. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n3p109>
- Mame, B. P. W. (2020). *Pengaruh tata kelola perusahaan, kualitas audit, dan struktur kepemilikan terhadap audit fee* [Universitas Katolik Soegijapranata].



<http://repository.unika.ac.id/21517/>

- Mardani, L. S. (2018). *Pengaruh corporate governace terhadap audit fee (studi empiris pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2007-2016)*. Universitas Diponegoro.
- Marie L’Huillier, B. (2014). What does “corporate governance” actually mean? *Corporate Governance (Bingley)*, 14(3), 300–319. <https://doi.org/10.1108/CG-10-2012-0073>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 186 /pmk.01/2021 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik*.
- Nasrum, M. (2018). *Corporate governance (konsep, teori dan aplikasi di beberapa negara asia)* (Issue 4, pp. 728–746). <https://doi.org/10.5553/ejlr/138723702014016004005>
- Nugrahani, N. R., & Sabeni, A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan fee audit eksternal pada perusahaan yang terdaftar di bei. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 33/pojk.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik*. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK\\_33\\_Direksi\\_dan\\_Dewan\\_Komisaris\\_Emiten\\_Atau\\_Perusahaan\\_Publik.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK_33_Direksi_dan_Dewan_Komisaris_Emiten_Atau_Perusahaan_Publik.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan otoritas jasa keuangan no 55/pojk.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit*. In *Ojk.Go.Id*. [http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK_PERIZINAN_FINAL_F.pdf)
- Pramesti, I. G. A. R., & Wiratmaja, I. D. N. (2017). Pengaruh fee audit, profesionalisme pada kualitas audit dengan kepuasan kerja sebagai pemediasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 616–645.
- Pratama, Y. W. A., & Cahyonowati, N. (2015). Pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap fee auditor eksternal. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 1–10.
- Prawira, F. I. (2017). Pengaruh karakteristik dewan komisaris, komite audit , dan kesulitan keuangan terhadap fee audit. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(1), 1689–1699.
- Priambardi, R. B., & Haryanto. (2014). Determinan auditor switching pada perusahaan non keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 736–746.



- Raghunandan, K. & R., Rama, W. &, & Dasaratha. (2001). Audit committee composition, “gray directors,” and interaction with internal auditing. *Accounting Horizons - ACCOUNT HORIZ.* 15. 105-118. 10.2308/Acch.2001.15.2.105.
- Rizqiasih, P. D. (2010). *Pengaruh struktur governance terhadap fee audit eksternal*. Universitas Diponegoro.
- Sibuea, K., & Arfianti, R. I. (2021). Pengaruh kualitas audit, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan dan risiko perusahaan terhadap audit fee. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 126–140. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.804>
- Siddiq, F. R., & Suseno, A. E. (2019). Fraud pentagon theory dalam financial statement fraud pada perusahaan terdaftar di jakarta islamic index (jii) periode 2014-2017 (perspektif f-score model). *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 4(2), 128–138. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v4i2.13800>
- Sinaga, E. A., & Rachmawati, S. (2018). Besaran fee audit pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 18(1), 19.
- Sitompul, F. (2017). *Pengaruh mekanisme good corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap audit fee eksternal (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia)*. 2(1), 67–76.
- Suharli, M. (2008). *Konsentrasi auditor dan penetapan fee audit : investigasi pada bumh*. 133–148.
- Vafeas, N. (1999). Board meeting frequency and firm performance. *Journal of Financial Economics*, 53(1), 113–142. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(99\)00018-5](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(99)00018-5)
- Vafeas, N., & Waagelein, J. F. (2007). The association between audit committees, compensation incentives, and corporate audit fees. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 28(3), 241–255. <https://doi.org/10.1007/s11156-006-0012-9>
- Wibowo, R. H. (2012). Pengaruh struktur governance dan etnisitas terhadap fee audit. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Widiasari, E., & Prabowo, T. J. W. (2008). *Pengaruh pengendalian internal perusahaan dan struktur corporate governance terhadap fee audit*. 9(2), 125–137.
- Wiryaningrum, M. S. (2018). *Pengaruh faktor internal perusahaan terhadap penetapan fee audit di indonesia (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2014-2016)*. Universitas Diponegoro.

Yatim, P., Kent, P., & Clarkson, P. (2006). Governance structures, ethnicity, and audit fees of Malaysian listed firms. *Managerial Auditing Journal*, 21(7), 757–782. <https://doi.org/10.1108/02686900610680530>



## LAMPIRAN

### Lampiran Hasil *Output* SPSS

#### Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	330	.0000	1.0000	.379553	.0907440
Komite Audit Independen	330	.0000	1.0000	.346134	.0867749
Intensitas Rapat Komite Audit	330	1	16	5.15	2.420
Intensitas Rapat Dewan Komisaris	330	1	38	6.37	4.130
Ukuran Dewan Komisaris	330	2	10	4.05	1.746
Big4 (Kantor Akuntan Publik)	330	0	1	.46	.499
LNFee (Biaya Audit)	330	Rp50.000.000,00	Rp19.300.000.000,00	Rp1.411.658.330,00	1.18740
Valid N (listwise)	330				

#### Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

Tests of Normality			
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.049	330	.054
a. Lilliefors Significance Correction			

### Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Dewan Komisaris Independen	.927	1.078
	Komite Audit Independen	.862	1.160
	Intensitas Rapat Komite Audit	.964	1.038
	Intensitas Rapat Dewan Komisaris	.938	1.066
	Ukuran Dewan Komisaris	.635	1.575
	Big4 ( Kantor Akuntan Publik)	.725	1.379

a. Dependent Variable: LNFee (Biaya Audit)

### Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	t	Sig.
1	(Constant)	1.323 .187
	Dewan Komisaris Independen	1.957 .051
	Komite Audit Independen	1.725 .086
	Intensitas Rapat Komite Audit	-1.273 .204
	Intensitas Rapat Dewan Komisaris	-.597 .551
	Ukuran Dewan Komisaris	1.903 .058
	Big4 ( Kantor Akuntan Publik)	-1.184 .237

a. Dependent Variable: Abs\_RES

## Uji Autokorelasi

### Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.07532
Cases < Test Value	165
Cases $\geq$ Test Value	165
Total Cases	330
Number of Runs	189
Z	1.536
Asymp. Sig. (2-tailed)	.061
a. Median	

### Durbin Watson

Model Summary <sup>b</sup>	
Model	Durbin-Watson
1	2.136
a. Predictors: (Constant), Big4, InDir, AuInd, AudMeet, BMeet, BSize	
b. Dependent Variable: LNFee	

## Uji Hipotesis

### Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 <sup>a</sup>	.717	.712	.63745
a. Predictors: (Constant), Big4, InDir, AuInd, AudMeet, BMeet, BSize				
b. Dependent Variable: LNFee				



### Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	332.620	6	55.437	136.430	.000 <sup>b</sup>
	Residual	131.247	323	.406		
	Total	463.866	329			
a. Dependent Variable: LNFee						
b. Predictors: (Constant), Big4, InDir, AuInd, AudMeet, BMeet, BSize						

### Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.168	.234		73.258	.000
	Dewan Komisaris Independen	1.122	.402	.086	2.790	.006
	Komite Audit Independen	1.538	.436	.112	3.525	.000
	Intensitas Rapat Komite Audit	.036	.015	.073	2.423	.016
	Intensitas Rapat Dewan Komisaris	.006	.009	.023	.739	.460
	Ukuran Dewan Komisaris	.333	.025	.489	13.169	.000
	Big4 (Kantor Akuntan Publik)	1.061	.083	.446	12.835	.000
	a. Dependent Variable: LNFee (Biaya Audit)					